



LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
TAHUN 2024

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah dan anugerah-Nya, Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 yang mana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar selama tahun anggaran 2023. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang pemerintahan yang baik.

Pematangsiantar, Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA

PEMATANGSIANTAR

JUNAEDI A. SITANGGANG, S.STP,M.Si



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	i
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
1.1 Penjelasan Umum Organisasi .....	1
1.2 Aspek Strategis Organisasi.....	1
1.3 Permasalahan Umum (Isu Strategis).....	3
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	4
2.1 Ikhtisar Perjanjian Kinerja .....	4
2.2 Indikator Kinerja Utama .....	5
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	11
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	11
3.2 Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar .....	20
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	26
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Penjelasan Umum Organisasi**

Kedudukan Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota, yang mana Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dan Staf Ahli Wali Kota Pematangsiantar, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **1.2 Aspek Strategis Organisasi**

Masing-masing unit organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

## *LAPORAN KINERJA SETDAKO TAHUN 2023*

Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Wali Kota Pematangsiantar, Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Berdasarkan Perturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.

Susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar terdiri atas :

A. Sekretaris Daerah

B. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :

1. Bagian Pemerintahan
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat
3. Bagian Hukum

C. Asisten Perekonominan dan Pembangunan, terdiri atas :

1. Bagian Perekonominan dan Sumber Daya Alam
2. Bagian Administrasi Pembangunan
3. Bagian Pengadaan barang dan Jasa

D. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas :

1. Bagian Umum
2. Bagian Organisasi
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing.Para Jabatan Fungsional menyampaikan laporan pada waktunya kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya dan para Kepala Bagian menampung

## LAPORAN KINERJA SETDAKO TAHUN 2023

laporan tersebut dan menyusun laporan untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.

### **1.3 Permasalahan Umum (Isu Strategis)**

Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa akan datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar sebagai unsur penunjang dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan di dalam RPJMD yaitu :

1. Responsibilitas SKPD dalam penyampaian laporan dan data yang dibutuhkan;
2. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Instansi Pemerintah maupun lembaga lainnya.;
3. Pelayanan administrasi kecamatan dan kelurahan;
4. Penentuan batas wilayah kabupaten/kota;
5. Sarana dan prasarana pada beberapa unit kerja bagian;
6. Kualitas penyusunan produk hukum, pelayanan kasus hukum dan penyebarluasan produk hukum daerah;
7. Kompetensi SDM pada beberapa unit kerja bagian;
8. Informasi tentang terbitnya peraturan perundang-undangan terbaru mengenai Analisis Kelembagaan, Anjab, ABK, Pengelola data Ketatalaksanaan yang bersifat dinamis;
9. Pengelolaan dan pengembangan BUMD dan BLUD serta ekonomi mikro kecil;
10. Tata kelola surat-menurut dan pengelolaan aset.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja ini maka terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Renstra dan DPA. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2024.

**Tabel 2.1**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2023**  
**Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	C ( >45-50)
		Predikat/Skor AKIP Kota Pematangsiantar	CC (>50-55)
		Nilai LPPD	Tinggi (3,50-3,60)
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	60
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (76,61-78)

## LAPORAN KINERJA SETDAKO TAHUN 2023

No	PROGRAM / KEGIATAN	KET
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	33.634.922.001
2.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	9.729.106.420
3.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.336.944.074
	<b>TOTAL</b>	<b>45.700.972.495</b>

Dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut di atas, untuk tahun 2023

Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar telah menetapkan 3 (tiga) program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3. Program Perekonomian dan Pembangunan.

Melalui pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada ketiga program di atas, maka Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar dapat mewujudkan sasaran dan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah untuk tahun 2023.

### 2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2022-2027,sesuai dengan tabel di bawah ini :

**TABEL 2.2**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN CAPAIAN IKU
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai komponen pelaporan kinerja pada penilaian Sakip	Penilaian Kemenpan RB
		Persentase penyampaian laporan kinerja perangkat daerah tepat waktu	Jumlah perangkat daerah yang menyampaikan laporan kinerja tepat waktu dibagi jumlah perangkat daerah dikali 100%
		Persentase beradministrasi baik	Jumlah kelurahan beradministrasi baik dibagi jumlah kelurahan di kota pematangsiantar dikali 100%
	Penyampaian LPPD yang tepat waktu	Penyampaian LPPD yang tepat waktu	Waktu penyampaian LPPD ke Pemerintah Provinsi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
	Penyampaian LKPJ yang tepat waktu	Penyampaian laporan SPM yang tepat waktu	Waktu penyampaian LKPJ dalam sidang Paripurna paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pelayanan Publik	Persentase realisasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan RUP	Jumlah realisasi pengadaan barang dan jasa dibagi jumlah nilai RUP pada SIRUP dikali 100%
		Persentase perangkat daerah yang memiliki indeks kepuasan masyarakat yang bernilai baik	Jumlah perangkat daerah yang memiliki indeks kepuasan masyarakat yang bernilai baik dibagi dengan jumlah perangkat daerah dikali 100%

**LAPORAN KINERJA SETDAKO TAHUN 2023**

	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Jumlah kelembagaan perangkat daerah yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dibagi jumlah perangkat daerah dikali 100%
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat Daerah.	.Persentase pilar batas wilayah yang sudah dibangun.	Jumlah pilar batas wilayah yang sudah dibangun dibagi jumlah pilar batas wilayah yang sudah ditetapkan dikali 100%
	Persentase kerjasama yang terfasilitasi	Jumlah kerjasama yang terfasilitasi dibagi jumlah permohonan rencana kerjasama dikali 100%
	Persentase fasilitasi kegiatan keprotokolan, komunikasi dan dokumentasi KDH/WKDH	Jumlah realisasi laporan keprotokolan, komunikasi dan dokumentasi KDH/WKDH dibagi target laporan keprotokolan, komunikasi dan dokumentasi KDH/WKDH dikali 100%
	Persentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	Jumlah realisasi kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi dibagi jumlah fasilitasi kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang ditargetkan dikali 100%
	Persentase fasilitasi terkait kebijakan kesejahteraan rakyat yang terlaksana	Jumlah realisasi fasilitasi terkait kebijakan kesejahteraan rakyat yang terlaksana dibagi target fasilitasi terkait kebijakan kesejahteraan rakyat dikali 100%
	Persentase produk hukum yang sesuai dengan azas pembentukan produk hukum yang baik	Jumlah produk hukum yang dievaluasi dibagi jumlah produk hukum daerah yang diterbitkan dalam setahun dikali 100%
	Persentase penyelesaian kasus hukum	Jumlah kasus yang selesai dibagi dengan kasus yang ditangani dalam satu tahun dikali 100%

**LAPORAN KINERJA SETDAKO TAHUN 2023**

Persentase produk hukum yang didokumentasikan	Jumlah produk hukum yang di dokumentasikan dibagi jumlah produk hukum yang diterbitkan dalam 1 (satu) tahun dikali 100%
Persentase kebijakan perekonomian yang terlaksana	Jumlah realisasi kebijakan perekonomian yang terrealisasi dibagi dengan jumlah kebijakan perekonomian yang ditargetkan dikali 100%
Persentase SKPD yang menyampaikan laporan monitoring evaluasi ( Monev) tepat waktu	Jumlah SKPD yang menyampaikan laporan monitoring evaluasi (Monev) tepat waktu dibagi jumlah SKPD yang ada di Kota Pematang Siantar di kali 100%
Persentase SKPD yang melaporkan progress kegiatan fisik tepat waktu	Jumlah SKPD yang melaporkan kegiatan fisiknya tepat waktu dibagi jumlah SKPD penyelenggara kegiatan fisik dikali 100%
Persentase administrasi keuangan dalam kategori baik	Jumlah administrasi keuangan yang tepat waktu dibagi jumlah administrasi keuangan yang dilaksanakan dikali 100%
Persentase ketersediaan barang milik daerah sebagai sarana dan prasarana	Jumlah barang yang tersedia dibagi rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) dikali 100%
Persentase pelayanan administrasi umum dalam kategori baik	Jumlah administrasi umum yang telah dilaksanakan dibagi jumlah administrasi umum yang seharusnya dilaksanakan dikali 100%
Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lancar	Jumlah pembayaran gaji THL, pembayaran Air, Listrik, Telepon dan Belanja Sewa dibagi jumlah kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan dikali 100%
Persentase ketersediaan barang milik daerah sebagai sarana dan prasarana	Jumlah barang yang tersedia dibagi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dikali 100%

**LAPORAN KINERJA SETDAKO TAHUN 2023**

Persentase administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah kategori baik	Jumlah administrasi keuangan KDH/WKDH yang tepat waktu dibagi jumlah administrasi keuangan KDH/WKDH yang dilaksanakan dikali 100%
Persentase fasilitasi kerumah tanggaan Sekretariat Daerah kategori baik	Jumlah kebutuhan rumah tangga yang tersedia dibagi jumlah rencana kebutuhan rumah tangga dikali 100%

## *LAPORAN KINERJA SETDAKO TAHUN 2023*

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa dalam upaya mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka diperlukan :

1. Peningkatan pelaporan kinerja yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja;
2. Peningkatan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
3. Penataan standar administrasi dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa;
4. Peningkatan pengetahuan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
5. Menyempurnakan regulasi dibidang pelayanan publik, kelembagaan, Anjab, ABK dan Ketatalaksanaan.
6. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik;
7. Peningkatan kualitas administrasi di kecamatan dan kelurahan;
8. Peningkatan pengetahuan SDM Apartur yang terkait dengan pelayanan Sekretariat Daerah;
9. Peningkatan kemampuan ASN dalam penyusunan rancangan produk hukum;
10. Pelayanan administrasi persuratan berbasis elektronik;
11. Peningkatan monitoring dan evaluasi pertumbuhan ekonomi.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Kesatuan Republik Indonesia. Dengan perencanaan strategi yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Sasaran merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Dengan adanya tujuan sebagai penjabaran dari misi diharapkan akan memberikan arah operasional pembangunan kota yang lebih terukur, objektif dan terintegrasi.

Pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah Kota Pematangsiantar merupakan tanggungjawab semua OPD pada Pemerintah Kota Pematangsiantar.

Berikut pencapaian sasaran strategis pada Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar sesuai dengan tabel di bawah ini :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	C (>45-50)	CC (54, 82)
		Predikat/Skor AKIP Kota Pematangsiantar	CC (>50-55)	CC (55,32)

LAPORAN KINERJA SETDAKO TAHUN 2023

		Nilai LPPD	Tinggi ( 3,50- 3,60)	Belum Rilis
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	60	61,86
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (76,61-78)	B (84,75)

**3.1.2 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar untuk tahun 2023, terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja. Yang mana dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 3.1.1  
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	C ( >45-50)	CC (54, 82)
2.	Predikat/Skor AKIP Kota Pematangsiantar	CC (>50-55)	CC (55,32)
3.	Nilai LPPD	Tinggi (3,50-3,60)	Belum Rilis
4.	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	60	61,86
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (76,61-78)	B (84,75)

## *LAPORAN KINERJA SETDAKO TAHUN 2023*

Berdasarkan tabel di atas maka capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1. Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi**

Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2023 adalah **54,82** dengan kategori “ **CC**”. Jika dilihat dari target sebesar ( >45-50) maka capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100%. Namun target yang ditetapkan masih belum sesuai dengan yang diharapkan dan yang diinginkan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar agar bisa mendapatkan predikat “B” untuk nilai Reformasi Birokrasi.

### **2. Capaian Kinerja Predikat/Skor AKIP Kota Pematangsiantar**

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kota Pematangsiantar tahun 2023 menunjukkan bahwa nilai sebesar **55,32**dengan predikat “**CC**”. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Akuntabilitas kinerja “ **Cukup**”, yaitu implementasi AKIP sudah cukup baik.

### **3. Capaian Kinerja Nilai LPPD**

Untuk tahun 2023, hasil EPPD Pemerintah Kota Pematangsiantar belum rilis oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga belum dapat dibandingkan hasil realisasi dengan target yang telah ditetapkan.

### **4. Capaian Kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa**

Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Pematangsiantar tahun 2023 mendapatkan total nilai pembobotan berjumlah “ **61,86**”dengan predikat cukup. Dimana target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar “**60**”dan ini bisa dikatakan kalau Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa sudah cukup.

Adapun indikator Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yaitu :

## LAPORAN KINERJA SETDAKO TAHUN 2023

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan (bobot 30%), yang terdiri dari :
  - 1.1. SIRUP ( Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yaitu Nilai RUP SIRUP dibandingkan dengan nilai belanja PBJ, bobot 10%.
  - 1.2. E-Tendering (Tender Seleksi/Tender Cepat) yaitu nilai realisasi dibandingkan dengan nilai RUP untuk e-Tendering, bobotnya 5%.
  - 1.3. E-Purchasing (Toko Daring) yaitu jumlah paket selesai dibandingkan jumlah paket aktif ePurchasing (Katalog Elektronik), bobot eKatalog 4% dan Toko Daring 1%.
  - 1.4. Non e-Tendering dan Non e-Purchasing yaitu nilai realisasi dibandingkan dengan nilai RUP untuk Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung, bobot 5%.
  - 1.5. E-Kontrak yaitu jumlah paket yang dicatat dalam ekontrak dibandingkan dengan jumlah paket transaksional, bobotnya 5%
2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yaitu meliputi pencatatan Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang mengalami pemberhentian dari JF PPBJ, pension, meninggal dunia dan pengangkatan kembali dalam JF PPBJ, bobotnya 30%.
3. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yaitu penyusunan dokumen bukti dukung Tingkat Kematangan UKPBJ proaktif sesuai Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP Nomor 2 tahun 2022, bobot 40%.

### **4. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat**

Indeks Kepuasan Masyarakat dilihat dari aplikasi Sikemas tahun 2023 dengan nilai ”**84,75**” dan indeks ini melebihi target yang telah ditetapkan senilai ”**78**” dan telah mencapai kualitas penyelenggaraan pelayanan publik bernilai baik. Aplikasi Sikemas ini merupakan metode pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang berbasis online.

## LAPORAN KINERJA SETDAKO TAHUN 2023

### 3.1.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun Terakhir

Tahun 2023 merupakan tahun kedua dari Renstra 2022-2027, sehingga capaian kinerja untuk tahun 2023 sudah dapat dibandingkan. Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu**  
**Dan Beberapa tahun Terakhir**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	REALISASI 2022	REALISASI 2021
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	C ( >45-50)	CC (54, 82)	C (45,63)	C (42,39)
2.	Predikat/Skor AKIP Kota Pematangsiantar	CC (>50-55)	CC (55,32)	CC (50,18)	C (40,57)
3.	Nilai LPPD	Tinggi (3,50-3,60)	Belum Rilis	Rendah (2,0321)	N/A
4.	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	60	61,86	68,00	43,74
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (76,61-78)	B (84,75)	B (81,91)	N/A

Berdasarkan tabel di atas, maka capaian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi

Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2023 adalah **54,82** dengan kategori “ **CC** ”. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan tahun 2022 capaian kinerja Indeks Reformasi Birokrasi sudah

## *LAPORAN KINERJA SETDAKO TAHUN 2023*

mengalami kenaikan secara berkesinambungan, yang mana pada tahun 2021 mendapatkan bobot **42,39** dan tahun **2022** dengan bobot **45,63**.

### **2. Capaian Kinerja Predikat/Skor AKIP Kota Pematangsiantar**

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kota Pematangsiantar tahun 2023 menunjukkan bahwa nilai sebesar **55,32**dengan predikat “**CC**”. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Akuntabilitas kinerja “ **Cukup**”, yaitu implementasi AKIP sudah cukup baik dibandingkan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dengan nilai**40,57** dengan predikat “**C**”dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan nilai dibandingkan tahun 2021 dengan nilai “**50,18**”dengan predikat “ **CC**”

### **3. Capaian Kinerja Nilai LPPD**

Untuk tahun 2023, hasil nilai LPPD Pemerintah Kota Pematangsiantar belum rilis oleh Kementerian Dalam Negeri, sedangkan pada tahun 2022 nilai LPPD Kota Pematangsiantar memperoleh skor “ **2,0321**” dengan status “**Rendah**”.Adapun penyebab Nilai LPPD yang rendah disebabkan hasil capaian IKK OPD masih rendah.

### **4. Capaian Kinerja Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa**

Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Pematangsiantar tahun 2023 mendapatkan total nilai pembobotan berjumlah “ **61,86**”dibandingkan dengan tahun 2022 dengan bobot jumlah “ **68,0**” , dimana ini mengalami penurunan.

### **5. Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat**

Indeks Kepuasan Masyarakat dilihat dari Aplikasi Sikemas tahun 2023 dengan nilai ” **84,75**” dan ini telah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitutahun 2022 dengan nilai ”**81,91**” dan ini telah mencapai kualitas penyelenggaraan pelayanan publik bernilai baik dengan menggunakan Aplikasi Sikemas, yang mana aplikasi ini merupakan metode pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang berbasis online.

*LAPORAN KINERJA SETDAKO TAHUN 2023*

**3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Daerah**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET
		2023	2023	2024	2025	2026
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	C (>45-50)	CC (54, 82)	CC (>50-60)	B (>60-65)	B (>65-67)
2.	Predikat/Skor AKIP Kota Pematangsiantar	CC (>50-55)	CC (55,32)	CC (>55-60)	B (>60-65)	B (>65-70)
3.	Predikat / Skor AKIP Sekretariat Daerah	CC	CC	CC	B	B
4.	Nilai LPPD	Tinggi (3,50- 3,60)	Belum Rilis	Tinggi (3,61- 3,80)	Tinggi (3,81- 4,00)	Tinggi (4,01-4,20)
5.	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	60,00	61,86	70,00	75,00	80,00
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (76,61- 78)	B (84,75)	B (78-80)	B (80-82)	B (80-82)
7.	Inovasi Perangkat Daerah	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar tahun 2023 sudah melebihi target akhir RENSTRA. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 sebesar 84,75 poin dan target akhir RENSTRA sebesar 4,8 poin.

### **3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan**

Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar berdasarkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar telah mencapai target seperti yang dinyatakan pada Perjanjian Kinerja tersebut. Keberhasilan dan kegagalan ini didukung oleh beberapa faktor antara lain :

#### **1. Tersedianya Anggaran Yang Memadai**

Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar diberikan Anggaran sebesar Rp.47.932.883.175,00 dan Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar dapat meningkatkan kinerjanya melalui program-program yang ada di Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar.

#### **2. Sarana dan prasarana kantor yang memadai**

Dalam pencapaian kinerja yang baik, maka sarana dan prasarana sangat diperlukan. Sarana dan prasarana yang ada di Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar bersumber kepada APBD yang ada di Sekretariat Kota Pematangsiantar.

### **3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dengan adanya Sumber Daya Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Manusia yang ada serta dibarengi dengan anggaran yang ada di Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar maka ini adalah salah satu hal yang dapat mendukung keberhasilan kinerja yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2023.

### **3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Sesuai dengan Dokumen Perencanaan tahunan Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar, maka Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar melaksanakan 3 (tiga) program dengan 19 ( sembilan belas ) kegiatan yaitu :

## LAPORAN KINERJA SETDAKO TAHUN 2023

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Program ini terdiri dari atas 10 ( sepuluh ) kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah;
10. Penataan Organisasi;
11. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

### 2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Program ini terdiri atas 4 ( empat ) kegiatan yaitu :

1. Administrasi Tata Pemerintahan;
2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat;
3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;
4. Fasilitasi Kerjasama Daerah.

### 3. Program Perekonomian dan Pembangunan.

Program ini terdiri atas 4 ( empat) kegiatan yaitu :

1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
4. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

## LAPORAN KINERJA SETDAKO TAHUN 2023

Dalam menjalankan program dan kegiatan di atas, Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar diberikan Anggaran sebesar Rp. 47.932.883.175,00 dan pelaksanaan kinerja di Sekretariat Daerah Kota telah berjalan dengan baik.

### **3.2 Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar**

**Tabel 3.2  
Realisasi Anggaran Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	131,705,692	127,609,248	97
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	114.557.806	110,839,160	96.75
	1. Perangkat Daerah			
2.	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.147.886	16,770,088	97.80
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13,555,527,931.00	13,223,118,543.00	97.55
3.	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12,456,686,065	12,196,514,307	97.91
	2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1,098,841,866.	1,026,604,236	93.43
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33,318,192	31,523,339	94.61
	1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	31,523,339	31,523,339	94.61
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7,088,542,668	6,409,966,974	90.43
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	176,679,59	92,547,167	52.38
	2. Penyediaan Peralatan dan	178,429,282	158,305,114	88.72

LAPORAN KINERJA SETDAKO TAHUN 2023

	Perlengkapan Kantor			
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	246,366,844	180,943,020	73.44
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3,376,900,000	3,342,955,145	98.99
5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103,155,245	60,615,940	58.76
6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	215,250,000	203,999,120	94.77
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,791,761,700	2,370,601,468	84.91
<b>5.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2,614,960,400</b>	<b>2,023,640,000</b>	<b>77.39</b>
1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,120,000,000	990,000,000	88.39
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	972,510,400	793,700,000	81.61
3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	522,450,000	239,940,000	45.93
<b>6.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>5,061,654,480</b>	<b>4,418,425,785</b>	<b>87.29</b>
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,062,040,480	933,498,905	87.90
2.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,912,040,000	1,634,652,880	85.49
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,087,574,000	1,850,274,000	88.63
<b>7.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2,406,704,000</b>	<b>1,599,250,206</b>	<b>66.45</b>

*LAPORAN KINERJA SETDAKO TAHUN 2023*

	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,116,880,000	898,417,756	80.44
	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,188,000,000	616,817,450	51.92
	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	101,824,000	84,015,000	82.51
8.	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>808,300,316</b>	<b>590,741,028</b>	<b>73.08</b>
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	160,700,316	87,945,494	54.73
	2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	197,600,000	122,822,016	62.16
	3. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0.00	0.00	0.00
	4. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	450,000,000	379,973,518	84.44
9.	<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>500,485,300</b>	<b>495,800,270</b>	<b>99.06</b>
	1. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	444,044,200	442,717,164	99.70

*LAPORAN KINERJA SETDAKO TAHUN 2023*

	2. <b>Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah</b>	1,300,000.00	638,701.00	49.13
	3. <b>Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah</b>	55,141,100	52,444,405	95.11
10	<b>Penataan Organisasi</b>	543,227,794	463,059,053	85.24
	1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	112,250,009	96,395,965	85.88
	2. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	120,167,011	103,983,772	86.53
	3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	132,758,960	118,850,741	89.52
	4. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	99,391,765	77,003,801	77.48
	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	78,660,049	66,824,774	84.95
11.	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	1,311,182,068	1,098,982,178	83.82
	1. Fasilitasi Keprotokolan	744,946,800	586,879,243	78.78
	2. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	99,259,918	91,460,935	92.14
	3. Pendokumentasian Tugas Pimpinan	466,975,350	420,642,000	90.08
12.	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	932,525,444	861,187,778	92.35
	1. Penataan Administrasi Pemerintahan	397,323,602	360,197,314	90.66
	2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	201,253,316	189,681,096	94.25

**LAPORAN KINERJA SETDAKO TAHUN 2023**

	3.	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	333,948,526	311,309,368	93.22
13.		<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>9,206,471,213</b>	<b>8,801,354,929</b>	<b>95.60</b>
	1.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1,951,391,825	1,819,607,845	93.25
	2.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	6,982,991,611	6,741,929,184	96.55
	3.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	272,087,777	239,817,900	88.14
14.		<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>656.723.514</b>	<b>635.868.526</b>	<b>96.82</b>
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	310,248,328	296,272,458	95.50
		Fasilitasi Bantuan Hukum	214,175,196	210,607,443	98.33
		Pendokumentasian Produk Hukum	132,299,990	128,988,625	97.50
15.		<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>340,830,932</b>	<b>320,961,454</b>	<b>94.17</b>
	1.	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	315,334,620	299,591,197	95.01
	2.	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	25,496,312	21,370,257	83.82
16.		<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>650,327,985</b>	<b>608,448,117</b>	<b>93.56</b>
	1.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	431,491,025	406,619,936	94.24
	2.	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	95,968,466	84,926,620	88.49

**LAPORAN KINERJA SETDAKO TAHUN 2023**

	3. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	122,868,494	116,901,561	95.14
17.	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>443,658,140</b>	<b>427,204,470</b>	<b>96.29</b>
	1. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	96,933,209	93,905,806	96.88
	2. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	108,040,999	101,207,302	93.67
	3. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	238,683,932	232,091,362	97.24
18.	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>1,216,726,708</b>	<b>1,119,394,021</b>	<b>92.00</b>
	1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	400,444,364	381,187,811.00	95.19
	2. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	475,456,102	456,854,925	96.09
	3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	340,826,242	281,351,285	82.55
19.	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>430,010,398</b>	<b>407,459,424</b>	<b>94.76</b>
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	430,010,398	407,459,424	94.76
	<b>JUMLAH.....</b>	<b>47.932.883.175</b>	<b>43.592.601.465</b>	<b>90,95</b>

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang pengelolaan dalam pencapaian kinerja Sekretariat Kota Pematangsiantar yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini karena dukungan dan keseriusan seluruh Aparatur Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam tugas dan kewajibannya dengan penuh rasa tanggungjawab, maupun seluruh stakeholders yang ada di Kota Pematangsiantar. Penyampaian Laporan Kinerja ini sebagai pemenuhan peraturan perundang-undangan juga sebagai evaluasi bagi Instansi Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar dalam menilai kinerja untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, serta memperhitungkan masalah maupun hambatan yang dihadapi, sehingga pada tahun mendatang kinerja Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar dapat ditingkatkan menjadi lebih baik.

Pematangsiantar, Maret 2024



# LAMPIRAN

**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190  
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/ 178 /AA.05/2023  
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023

27 November 2023

Kepada  
**Yth. Sekretaris Daerah Kota Pematang Siantar**  
di  
Pematang Siantar

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 pada Pemerintah Kota Pematang Siantar, dengan uraian sebagai berikut:

**1. Pendahuluan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Pematang Siantar. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government)**. Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

## **2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kota Pematang Siantar telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Memperbaiki sasaran strategis pada Perangkat Daerah (PD) yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis (Renstra) PD Tahun 2022-2027 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027;
- b. Membangun aplikasi SIPEKa (Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Kinerja) sebagai media pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja;
- c. Meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan melaksanakan pendampingan kepada seluruh PD untuk perbaikan perencanaan kinerja, serta meningkatkan kualitas SDM APIP dengan diikutkan dalam pendidikan dan pelatihan evaluasi SAKIP;
- d. Melaksanakan evaluasi internal akuntabilitas terhadap seluruh PD oleh Inspektorat;
- e. Menyusun draft Peraturan Wali Kota tentang Pedoman SAKIP dan Pedoman Evaluasi SAKIP pada PD di Lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021. Dokumen tersebut saat ini sedang dalam proses pengesahan.

## **3. Hasil Evaluasi**

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pematang Siantar menunjukkan bahwa nilai sebesar **55,32** dengan predikat “**CC**”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Cukup”**, yaitu **implementasi AKIP sudah cukup baik, namun masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya pada unit kerja**.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	19,84	20,84
b. Pengukuran Kinerja	30	12,75	15,08
c. Pelaporan Kinerja	15	5,89	6,81
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	11,70	12,59
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>50,18</b>	<b>55,32</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>CC</b>	<b>CC</b>

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Pematang Siantar tahun 2023 sebagai berikut:

### 1) Perencanaan kinerja

Pemerintah Kota Pematang Siantar telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang tertuang pada RPJMD yang selanjutnya dijabarkan dalam Renstra, Perjanjian Kinerja (PK), RKPD dan Renja baik pada tingkat Pemerintah Daerah maupun PD. Pemerintah Kota Pematang Siantar telah menyusun rencana aksi untuk memastikan bahwa setiap anggaran dan aktivitas mendukung pencapaian kinerja. Pemerintah Kota Pematang Siantar juga sudah menyusun pohon kinerja pada level Pemerintah Daerah dan PD. Namun demikian, masih terdapat hal yang menjadi catatan dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Cascading/penjenjangan kinerja yang disusun pada sebagian PD belum sepenuhnya dijabarkan sampai ke level operasional, serta belum sepenuhnya mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor* dalam proses penyusunannya;
- b. Dokumen PK Tahun 2023 pada sebagian PD belum disampaikan melalui esr.menpan.go.id secara lengkap, sehingga belum dapat disimpulkan bagaimana penjabaran kinerja secara keseluruhan dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi. Contohnya pada Dinas Pariwisata dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB);
- c. Sasaran strategis pada sebagian PD belum diukur dengan indikator kinerja yang sesuai dan cukup untuk menggambarkan kinerja *outcome* yang seharusnya diwujudkan. Contohnya pada PK Kepala Dinas Pariwisata Tahun 2023, yaitu sasaran "Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolahraga" yang diukur dengan indikator "Jumlah sarana dan prasarana olahraga" dengan target 8 lokasi, sasaran "Berkembangnya olahraga rekreasi dalam mendukung pariwisata" dengan indikator "Jumlah event olahraga yang dilaksanakan" dengan target 3 kegiatan;
- d. Terdapat indikator kinerja eselon III yang belum cukup untuk mengukur *outcome* sasarnanya. Contohnya pada PK Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2023, yaitu sasaran "Meningkatnya kinerja PNS/THL serta mewujudkan aparatur pemerintah daerah yang profesional dan berkarakter untuk mewujudkan pemerintah yang responsif, transparan, dan akuntabel" yang diukur

dengan indikator “Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik” target 5 bulan, “Tersedianya alat tulis kantor” target 5 bulan, dan seterusnya;

- e. Penetapan program dan kegiatan yang disusun oleh PD bersama Bappeda masih ditemukan belum berfokus pada pencapaian sasaran strategis, sehingga berpotensi menimbulkan adanya inefisiensi dan inefektivitas dalam mencapai kinerja;
- f. Setiap pegawai sudah merumuskan kinerja individu masing-masing, namun kinerja individu tersebut belum sepenuhnya selaras dengan kinerja organisasi.

## 2) Pengukuran Kinerja

Pemerintah Kota Pematang Siantar dan seluruh PD telah melakukan pengukuran kinerja atas realisasi kinerjanya. Seluruh PD juga telah memiliki rencana aksi untuk pencapaian kinerja. Untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja tersebut telah disusun pedoman formulasi perhitungan yang tertera pada Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah dan PD. Namun demikian, masih terdapat hal yang menjadi catatan dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Telah memiliki aplikasi manajemen kinerja seperti SIPEKa (Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Kinerja) dan e-Kinerja, namun belum sepenuhnya terintegrasi dan belum optimal dalam implementasinya untuk monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala;
- a. Hasil pengukuran kinerja belum digunakan sebagai bagian dari pengambilan keputusan baik dalam perubahan strategi dan target kinerja maupun pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai;
- b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi masih berorientasi pada penyerapan anggaran dan terlaksana atau tidaknya suatu program kegiatan. Monitoring dan evaluasi belum mempertimbangkan capaian kinerja *outcome* sehingga belum diketahui tingkat ketercapaiannya.

## 3) Pelaporan Kinerja

Pemerintah Kota Pematang Siantar telah menyusun laporan kinerja pada tingkat pemerintah daerah yang sudah diintegrasikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2022 dan laporan kinerja pada PD. Namun, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan

kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. LPPD Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2022 maupun laporan kinerja PD belum dipublikasikan secara umum melalui website;
- b. Terdapat kekeliruan dalam pengukuran capaian pada Laporan Kinerja Pemerintah Kota Pematang Siantar Tahun 2022. Contohnya pada indikator kinerja "Tingkat Kemiskinan" dengan target 8,52 – 8,46 persen dan realisasi 7,88 persen, disimpulkan capaian kinerjanya sebesar 92,48 persen. Sedangkan, indikator tersebut merupakan kategori progres negatif, yaitu semakin rendah realisasinya maka menggambarkan kondisi yang semakin baik. Contoh lainnya yang serupa seperti pada Laporan Kinerja DPPKB Tahun 2022, yaitu indikator "Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)";
- c. Informasi dan analisis dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan perencanaan kinerja dan strategi dalam pencapaiannya. Hal tersebut ditunjukkan pada penetapan target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup. Contohnya pada PK Wali Kota Pematang Siantar Tahun 2023, yaitu indikator kinerja "Tingkat Kemiskinan" dengan target tahun 2023 adalah 8,46 – 8,07 persen, sedangkan realisasi kinerja indikator tersebut pada tahun 2022 telah mencapai 7,88 persen. Contoh lainnya yang serupa seperti pada indikator "Pertumbuhan ekonomi";
- d. Penyajian laporan kinerja level PD belum sepenuhnya mengungkapkan informasi yang memadai untuk setiap indikator kinerja utama, seperti analisis ketercapaian, data pembanding (target, tren realisasi tahun-tahun sebelumnya, dan target jangka menengah), analisis efisiensi penggunaan sumber daya, faktor hambatan/pendukung, dan solusinya;
- e. Terdapat beberapa indikator yang capaian kinerjanya berada dibawah 75 persen. Contohnya pada Dinas Ketenagakerjaan, DPMPTSP, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu indikator "Persentase pencari kerja yang ditempatkan" dengan capaian kinerja sebesar 41,73 persen, indikator "Nilai Penanaman Modal" dengan capaian kinerja sebesar 73,81 persen, dan indikator "Berkurangnya luasan kawasan kumuh" dengan capaian sebesar 60,40 persen;
- f. Laporan kinerja belum menyajikan *benchmark* kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik di tingkat regional Provinsi Sumatera Utara maupun secara nasional.

#### 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Kota Pematang Siantar pada tahun 2023 telah melakukan evaluasi implementasi SAKIP pada seluruh PD. Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi tersebut telah disusun pedoman evaluasi internal yang mengacu pada PermenPAN RB No. 88 Tahun 2021. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:

- a. Laporan hasil evaluasi belum memberikan rekomendasi yang mendalam dan menyasar secara langsung akar permasalahan yang dialami oleh PD dalam mengimplementasikan SAKIP;
- b. PD belum sepenuhnya memanfaatkan secara maksimal hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang disampaikan oleh Inspektorat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja PD.
- c. Belum ada kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi SAKIP internal ini sehingga belum cukup untuk mendorong peningkatan implementasi SAKIP di PD.

#### 4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan setiap PD dengan memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (*result oriented*) dan memiliki kualitas indikator kinerja yang memenuhi kriteria yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) dan memenuhi unsur cukup dalam mengawal kinerja;
- 2) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen *cascading* kinerja baik di level Pemerintah Daerah maupun PD untuk memastikan kualitas *cascading* (penjenjangan) kinerja dari level tertinggi hingga terendah dapat berorientasi *outcome* (hasil) sesuai dengan levelnya dengan memerhatikan *logical framework* dan *critical success factor* dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sehingga program dan kegiatan yang disusun dapat efektif dan efisien dalam menyelesaikan isu strategis daerah. Proses reviu dan perbaikan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 3) Memanfaatkan hasil perbaikan *cascading* kinerja untuk memilah program dan kegiatan apa saja yang tidak relevan dengan sasaran strategis yang ingin dicapai dan berpotensi menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas dalam mencapai kinerja organisasi;
- 4) Menyampaikan perjanjian kinerja tahun berjalan secara lengkap dari level tertinggi sampai terkecil melalui [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id) agar dapat dipastikan penjabaran kinerja yang selaras dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi;
- 5) Melakukan reviu kinerja individu dan menyusun matriks pembagian peran hasil sehingga kinerja setiap individu dapat menunjang kinerja organisasi;
- 6) Mengoptimalkan penggunaan aplikasi manajemen kinerja yang terintegrasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dari level pimpinan sampai ke individu secara berkala (bulanan/triwulanan);
- 7) Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pegawai;
- 8) Mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja agar tidak hanya berfokus pada anggaran, namun juga pada kinerja. Sehingga ketercapaian kinerja dapat dan konsistensi antara perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja dapat terjaga dengan baik;
- 9) Menginformasikan Laporan Kinerja baik dari level pemerintah daerah maupun PD dalam website sebagai bagian dari transparansi atas pelaporan kinerja kepada publik;
- 10) Meningkatkan kualitas laporan kinerja pemda maupun PD dengan memastikan keandalan dan validitas pengolahan data kinerja, serta mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi ketercapaian/ tidak tercapainya kinerja organisasi beserta solusinya, membandingkan realisasi kinerja dengan tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, serta menyajikan data *benchmark* kinerja dengan rata-rata capaian kinerja atas indikator yang sama dan diukur baik di tingkat regional Provinsi Sumatera Utara maupun secara nasional;
- 11) Memanfaatkan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja. Serta, menjadikan capaian kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan target kinerja mendatang;

- 12) Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi dengan menyajikan temuan dan rekomendasi evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menggambarkan kekurangan dan solusi yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasikan SAKIP di setiap PD;
- 13) Melakukan monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diberikan kepada seluruh PD dan melaporkannya kepada pimpinan tertinggi di Pemerintah Kota Pematang Siantar;
- 14) Menyusun kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi SAKIP internal sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas implementasi SAKIP PD;
- 15) Meningkatkan pemahaman pimpinan dan SDM perencana, pengelola, serta evaluator internal terkait sistem akuntabilitas kinerja dan penjabaran (*cascading*) kinerja untuk meningkatkan implementasi manajemen kinerja instansi pemerintah.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Sumatera Utara;
4. Wali Kota Pematang Siantar.



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

### SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : BUDI UTARI, AP**

**Jabatan : SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

**Nama : dr. SUSANTI DEWAYANI, Sp.A**

**Jabatan : WALI KOTA PEMATANG SIANTAR**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematang Siantar, 23 Februari 2023

Pihak Kedua,



Pihak Pertama,



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANG SIANTR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	C (>45-50)
		Predikat/Skor AKIP Kota Pematang Siantar	CC (>50-55)
		Nilai LPPD	Tinggi (3,50-3,60)
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	60
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (76,61-78)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KET.
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	33.634.922.001
2.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	9.729.106.420
3.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.336.944.074
TOTAL		45.700.972.495

Pematang Siantar, 23 Februari 2023

Pihak Kedua,



Pihak Pertama,





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : DWI ARIES SUDARTO, SH, MH**

**Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

**Nama : dr. SUSANTI DEWAYANI, Sp. A**

**Jabatan : Wali Kota Pematangsiantar**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pematangsiantar, 23 Februari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**



**Dr. SUSANTI DEWAYANI, Sp.A**

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA**

**PEMATANGSIANTAR**



**DWI ARIES SUDARTO, SH, MH**

**PEMBINA UTAMA MUDA**

**NIP. 19710413 199603 1 002**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	CC
		Predikat/Skor AKIP Kota Pematangsiantar	B
		Predikat /Skor AKIP Sekretariat Daerah	B
		Nilai LPPD	Tinggi
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	70
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80
		Inovasi Perangkat Daerah	1 inovasi

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 32.613.222.361	APBD
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp 10.883.987.543	APBD
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp 1.858.498.925	APBD
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 45.355.708.829</b>	<b>APBD</b>

Pematangsiantar, 23 Februari 2024

Pihak Kedua,

**WALI KOTA PEMATANGSIANTAR**



SUSANTI DEWAYANI, Sp. A

Pihak Pertama,

**PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PEMATANGSIANTAR**



DWI ARIES SUDARTO, SH, MH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19710413 199603 1 002

Screenshot of a web browser showing the "SISTEM INFORMASI KEPUASAN MASYARAKAT PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR". The page displays a table of survey results for various respondents across nine categories (U1-U9). A green button labeled "lakukan Survei" is visible.

NO	NAMA RESPONDEN	JK	PENDIDIKAN	USIA	PEKERJAAN	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	Agustiana Refiana	P	SMA	40	Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	S. Tambunan	L	SI	40	Perawat	4	4	4	4	3	3	3	4	4

Screenshot of a web browser showing the same system interface. The table now includes 10 rows of survey data. A navigation bar at the bottom shows pages 1 through 616.

NO	RSPONDEN	JK	PENDIDIKAN	USIA	PEKERJAAN	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	Agustiana Refiana	P	SMA	40	Swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	S. Tambunan	L	SI	40	Perawat	4	4	4	4	3	3	3	4	4
3	Saharq Torigan	P	SMA	53	IRT	3	3	3	4	3	3	3	3	4
4	JOJOR D SIDABUTAR	P	SMA	41	WIRASWASTA	3	3	3	4	3	3	3	3	4
5	NOVRIDA HAFNI SURBAKTI, AM. Keb.	P	D III	28	PNS	3	4	4	4	4	3	3	4	4
6	B. Lumbar gool	L	SMA	42	Wiraswasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	Bilqis	P	SD	16	Pelajar	3	3	4	3	3	4	3	3	3
8	Nuriati Pane	P	SD	40	IRT	3	3	3	4	3	3	3	3	4
9	ISABELLE FELICIA	P	SD	4	TK	3	3	3	3	3	4	4	4	4
10	YAYUK	P	SMA	22	BELUM BEKRJA	3	3	3	4	3	3	3	3	4

Sistem Informasi IKM

## BAGIAN ORGANISASI KOTA PEMATANGSIANTAR

BERANDA DAFTAR DINAS DAFTAR USER LOGOUT

10	YAYUK	P	SMA	22	BELUM BEKRJA	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4
Showing 1 to 10 of 6,159 entries															
<a href="#">Previous</a> <a href="#">1</a> <a href="#">2</a> <a href="#">3</a> <a href="#">4</a> <a href="#">5</a> ... <a href="#">616</a> <a href="#">Next</a>															
Nilai/Unsur	20831	20606	20301	23645	20239	19887	20666	19787	23853	189815					
NRR/Unsur	3.38	3.35	3.30	3.84	3.29	3.23	3.36	3.21	3.87	30.82					
NRR Tertbg/Unsur	0.37	0.37	0.36	0.42	0.36	0.36	0.37	0.35	0.43	3.39					

Nilai IKM **84.75** (Baik)

Responden

Jumlah: 6159 Orang  
Jenis Kelamin: L = 2851 Orang / P = 3308 Orang

Sistem Informasi IKM

## BAGIAN ORGANISASI KOTA PEMATANGSIANTAR

BERANDA DAFTAR DINAS DAFTAR USER LOGOUT

Nilai IKM **84.75** (Baik)

Responden

Jumlah: 6159 Orang  
Jenis Kelamin: L = 2851 Orang / P = 3308 Orang  
Pendidikan:  
SD = 1421 Orang  
SMP = 560 Orang  
SMA = 2483 Orang  
D III = 324 Orang  
SI = 1274 Orang  
S2 = 94 Orang  
S3 = 3 Orang

**PENILAIAN FINAL INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)**  
**KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda) TAHUN 2023**

No	Nama K/L/PD	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Purchasing	Toko Daring	Non e-Tendering/Non e-Purchasing	e-Kontrak	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ	Total Nilai Pembobtan	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Majelis Permusyawaratan Rakyat	Kementerian/Lembaga	9,97	5,00	0,00	1,00	5,00	4,38	4,29	4,44	34,07	Kurang
2	Dewan Perwakilan Rakyat	Kementerian/Lembaga	0,00	4,10	0,00	1,00	0,00	0,00	6,52	35,56	47,18	Kurang
3	Dewan Perwakilan Daerah	Kementerian/Lembaga	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	5,00	0,00	17,78	28,78	Kurang
4	Badan Pemeriksa Keuangan	Kementerian/Lembaga	9,87	4,44	0,00	1,00	0,00	3,20	18,75	17,78	55,05	Cukup
5	Mahkamah Agung	Kementerian/Lembaga	5,53	5,00	0,00	1,00	0,00	3,10	2,56	0,00	17,19	Kurang
6	Mahkamah Konstitusi	Kementerian/Lembaga	9,99	5,00	0,00	1,00	0,00	4,38	9,00	35,56	64,93	Cukup
7	Komisi Yudisial	Kementerian/Lembaga	8,93	3,63	0,00	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	18,56	Kurang
8	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Kementerian/Lembaga	6,43	4,91	3,00	1,00	0,00	5,00	9,00	8,89	38,22	Kurang
9	Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian	Kementerian/Lembaga	6,52	5,00	3,45	1,00	0,00	4,33	8,57	35,56	64,43	Cukup
10	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Kementerian/Lembaga	9,93	4,76	4,00	1,00	4,04	5,00	18,00	35,56	82,29	Baik
11	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Kementerian/Lembaga	8,83	5,00	4,00	1,00	2,72	5,00	6,00	35,56	68,11	Cukup
12	Kementerian Sekretariat Negara	Kementerian/Lembaga	0,00	4,80	0,00	1,00	0,00	4,23	9,86	8,89	28,78	Kurang
13	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian/Lembaga	10,00	5,00	0,00	1,00	2,51	4,41	28,13	40,00	91,04	Sangat Baik
14	Kementerian Luar Negeri	Kementerian/Lembaga	9,39	0,00	0,00	1,00	0,00	2,06	8,00	35,56	56,01	Cukup
15	Kementerian Pertahanan	Kementerian/Lembaga	9,70	0,00	0,00	1,00	5,00	4,10	0,00	0,00	19,80	Kurang
16	Kementerian Agama	Kementerian/Lembaga	9,17	5,00	0,00	1,00	0,00	3,78	26,22	35,56	80,74	Baik
17	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kementerian/Lembaga	10,00	5,00	0,00	1,00	5,00	4,77	30,00	40,00	95,77	Sangat Baik
18	Kementerian Keuangan	Kementerian/Lembaga	10,00	5,00	3,16	1,00	0,00	4,79	22,17	40,00	86,12	Baik
19	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Kementerian/Lembaga	6,57	4,74	2,04	1,00	0,00	4,18	22,67	40,00	81,20	Baik
20	Kementerian Kesehatan	Kementerian/Lembaga	9,88	4,63	0,00	1,00	5,00	4,44	7,20	40,00	72,14	Baik
21	Kementerian Sosial	Kementerian/Lembaga	0,00	3,79	2,45	1,00	0,00	3,33	4,69	13,33	28,59	Kurang
22	Kementerian Ketenagakerjaan	Kementerian/Lembaga	9,13	5,00	0,00	1,00	0,00	3,31	8,57	40,00	67,01	Cukup
23	Kementerian Perindustrian	Kementerian/Lembaga	8,56	5,00	0,00	1,00	0,00	3,80	17,76	40,00	76,12	Baik
24	Kementerian Perdagangan	Kementerian/Lembaga	7,43	4,43	0,00	1,00	0,00	3,23	22,17	35,56	73,82	Baik



okumen ini telah ditandatangani secara elektronik

**PENILAIAN FINAL INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)**  
**KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda) TAHUN 2023**

No	Nama K/L/PD	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Purchasing	Toko Daring	Non e-Tendering/Non e-Purchasing	e-Kontrak	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ	Total Nilai Pembobotan	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian/Lembaga	7,06	5,00	0,00	1,00	0,00	3,84	15,90	40,00	72,80	Baik
26	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kementerian/Lembaga	7,63	3,09	3,23	1,00	3,84	4,39	19,98	40,00	83,16	Baik
27	Kementerian Perhubungan	Kementerian/Lembaga	9,76	5,00	0,00	1,00	2,92	4,22	16,75	40,00	79,64	Baik
28	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian/Lembaga	9,64	5,00	0,00	1,00	5,00	4,51	22,73	35,56	83,44	Baik
29	Kementerian Pertanian	Kementerian/Lembaga	8,55	5,00	0,00	1,00	0,00	3,98	9,75	35,56	63,83	Cukup
30	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian/Lembaga	10,00	4,20	0,00	1,00	0,00	3,84	23,69	0,00	42,72	Kurang
31	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian/Lembaga	9,78	5,00	2,45	1,00	2,82	4,65	20,74	40,00	86,44	Baik
32	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kementerian/Lembaga	9,04	4,83	0,00	1,00	0,00	4,06	21,75	40,00	80,68	Baik
33	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Kementerian/Lembaga	10,00	2,62	0,00	1,00	0,00	3,34	4,72	35,56	57,25	Cukup
34	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Kementerian/Lembaga	5,38	4,34	0,00	1,00	0,00	3,70	2,50	8,89	25,81	Kurang
35	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kementerian/Lembaga	5,81	5,00	2,72	1,00	0,00	4,55	18,00	35,56	72,63	Baik
36	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	Kementerian/Lembaga	9,95	5,00	2,00	1,00	2,67	5,00	30,00	35,56	91,18	Sangat Baik
37	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Munggah	Kementerian/Lembaga	10,00	5,00	0,00	1,00	5,00	4,83	17,73	35,56	79,12	Baik
38	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kementerian/Lembaga	9,48	5,00	0,00	1,00	2,74	3,65	7,20	35,56	64,62	Cukup
39	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kementerian/Lembaga	10,00	5,00	4,00	1,00	4,85	5,00	13,64	17,78	61,27	Cukup
40	Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Kementerian/Lembaga	0,00	5,00	0,00	1,00	4,30	2,81	0,00	13,33	26,44	Kurang
41	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	Kementerian/Lembaga	9,23	4,94	0,00	1,00	0,00	3,03	1,43	0,00	19,63	Kurang
42	Sekretariat Kabinet	Kementerian/Lembaga	10,00	5,00	3,33	1,00	5,00	5,00	7,50	22,22	59,05	Cukup
43	Kejaksaan Republik Indonesia	Kementerian/Lembaga	7,28	4,82	0,00	1,00	4,86	3,10	30,00	26,67	77,73	Baik
44	Kepolisian Negara Republik Indonesia**	Kementerian/Lembaga	6,21	5,00	0,00	1,00	5,00	4,20	-	35,56	81,38	Baik
45	Arsip Nasional Republik Indonesia	Kementerian/Lembaga	9,78	4,78	0,00	1,00	0,00	4,22	27,00	8,89	55,66	Cukup
46	Badan Informasi Geospasial	Kementerian/Lembaga	7,31	4,87	3,56	1,00	0,00	4,82	13,64	35,56	70,75	Baik
47	Badan Intelijen Negara	Kementerian/Lembaga	10,00	5,00	2,00	1,00	0,00	3,33	30,00	40,00	91,33	Sangat Baik
48	Badan Keamanan Laut	Kementerian/Lembaga	8,68	5,00	0,00	1,00	4,71	3,13	6,00	0,00	28,52	Kurang

PENILAIAN FINAL INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)  
KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda) TAHUN 2023

No	Nama K/L/PD	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Purchasing	Toko Daring	Non e-Tendering/Non e-Purchasing	e-Kontrak	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ	Total Nilai Pembobotan	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	Badan Kepegawaian Negara	Kementerian/Lembaga	10,00	4,62	0,00	1,00	5,00	4,77	17,84	40,00	83,24	Baik
50	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Kementerian/Lembaga	8,79	5,00	0,00	1,00	0,00	3,75	5,68	35,56	59,78	Cukup
51	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	Kementerian/Lembaga	6,37	4,26	0,00	1,00	0,00	4,30	2,73	35,56	54,23	Cukup
52	Badan Narkotika Nasional	Kementerian/Lembaga	9,94	4,33	2,48	1,00	5,00	3,89	3,75	40,00	70,39	Baik
53	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Kementerian/Lembaga	0,00	4,20	0,00	1,00	0,00	2,14	10,91	0,00	18,25	Kurang
54	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Kementerian/Lembaga	8,58	5,00	0,00	1,00	4,86	0,00	0,00	0,00	19,44	Kurang
55	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Kementerian/Lembaga	8,55	4,55	0,00	1,00	0,00	4,01	4,50	4,44	27,05	Kurang
56	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	Kementerian/Lembaga	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	Kurang
57	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	Kementerian/Lembaga	10,00	3,88	0,00	1,00	5,00	4,91	0,00	0,00	24,78	Kurang
58	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Kementerian/Lembaga	9,96	5,00	2,62	1,00	3,92	4,50	17,91	40,00	84,90	Baik
59	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Kementerian/Lembaga	10,00	4,56	3,04	1,00	5,00	4,26	30,00	35,56	93,42	Sangat Baik
60	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Kementerian/Lembaga	10,00	4,77	0,00	1,00	0,00	3,33	2,73	4,44	26,27	Kurang
61	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Kementerian/Lembaga	10,00	4,87	3,74	1,00	5,00	3,46	25,33	35,56	88,96	Baik
62	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam*	Kementerian/Lembaga	10,00	5,00	2,26	1,00	3,73	4,28	-	-	87,56	Baik
63	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang*	Kementerian/Lembaga	0,00	4,91	0,00	1,00	5,00	3,15	-	-	46,88	Kurang
64	Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Kementerian/Lembaga	6,13	4,65	0,00	1,00	0,00	1,43	17,65	0,00	30,86	Kurang
65	Badan Pusat Statistik	Kementerian/Lembaga	9,94	5,00	2,44	1,00	0,00	4,06	22,71	35,56	80,71	Baik
66	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Kementerian/Lembaga	9,71	3,80	0,00	1,00	0,00	3,33	24,47	35,56	77,87	Baik
67	Badan Siber dan Sandi Negara	Kementerian/Lembaga	10,00	5,00	2,18	1,00	2,55	3,77	19,29	40,00	83,78	Baik
68	Badan Standardisasi Nasional	Kementerian/Lembaga	10,00	4,76	3,31	1,00	0,00	5,00	21,00	17,78	62,85	Cukup
69	Dewan Ketahanan Nasional	Kementerian/Lembaga	8,90	0,00	3,67	1,00	0,00	0,00	9,00	35,56	58,13	Cukup
70	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	Kementerian/Lembaga	5,46	5,00	0,00	1,00	5,00	0,00	30,00	0,00	46,46	Kurang
71	Komisi Pemberantasan Korupsi	Kementerian/Lembaga	10,00	5,00	0,00	1,00	4,12	4,03	7,24	35,56	66,95	Cukup
72	Komisi Pemilihan Umum	Kementerian/Lembaga	8,72	4,68	0,00	1,00	0,00	3,09	7,40	4,44	29,34	Kurang

PENILAIAN FINAL INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)  
KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda) TAHUN 2023

No	Nama K/L/PD	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Purchasing	Toko Daring	Non e-Tendering/Non e-Purchasing	e-Kontrak	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ	Total Nilai Pembobotan	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	Kementerian/Lembaga	0,00	5,00	0,00	1,00	5,00	0,00	-	-	11,00	Kurang
74	Lembaga Administrasi Negara	Kementerian/Lembaga	8,14	5,00	0,00	1,00	0,00	4,83	22,50	13,33	54,80	Cukup
75	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kementerian/Lembaga	7,68	5,00	2,48	1,00	4,20	4,86	28,24	40,00	93,46	Sangat Baik
76	Lembaga Ketahanan Nasional	Kementerian/Lembaga	9,95	5,00	0,00	1,00	3,51	4,00	20,00	35,56	79,02	Baik
77	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	Kementerian/Lembaga	10,00	5,00	0,00	1,00	0,00	2,92	0	4,44	23,36	Kurang
78	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Kementerian/Lembaga	10,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	14,00	Kurang
79	Ombudsman Republik Indonesia	Kementerian/Lembaga	10,00	5,00	0,00	1,00	3,37	5,00	11,54	35,56	71,47	Baik
80	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Kementerian/Lembaga	6,07	4,57	0,00	1,00	0,00	2,92	5,72	0,00	20,28	Kurang
81	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Kementerian/Lembaga	10,00	5,00	2,71	1,00	5,00	4,92	13,75	31,11	73,49	Baik
82	Televisi Republik Indonesia	Kementerian/Lembaga	6,58	5,00	0,00	1,00	5,00	3,67	16,88	17,78	55,91	Cukup
83	Provinsi Aceh	Provinsi	10,00	4,69	0,00	1,00	4,24	3,58	25,20	40,00	88,71	Baik
84	Kota Langsa	Kota	10,00	4,98	0,00	1,00	3,48	4,52	24,71	17,78	66,47	Cukup
85	Kota Banda Aceh	Kota	10,00	4,58	0,00	1,00	0,00	3,64	0,00	13,33	32,56	Kurang
86	Kota Subulussalam	Kota	10,00	4,93	0,00	1,00	4,59	4,21	0,00	17,78	42,51	Kurang
87	Kota Lhokseumawe	Kota	10,00	4,67	0,00	1,00	3,54	4,71	0,00	8,89	32,81	Kurang
88	Kota Sabang	Kota	9,97	4,18	0,00	1,00	0,00	4,65	0,00	31,11	50,92	Cukup
89	Kabupaten Bireuen	Kabupaten	10,00	4,86	0,00	1,00	0,00	4,66	1,31	8,89	30,72	Kurang
90	Kabupaten Nagan Raya	Kabupaten	5,86	4,60	0,00	1,00	4,61	3,91	10,59	13,33	43,89	Kurang
91	Kabupaten Pidie	Kabupaten	10,00	4,95	0,00	1,00	4,09	3,37	15,71	8,89	48,01	Kurang
92	Kabupaten Pidie Jaya	Kabupaten	9,14	4,85	0,00	1,00	3,79	4,69	0,00	8,89	32,35	Kurang
93	Kabupaten Simeulue	Kabupaten	10,00	3,89	0,00	1,00	0,00	2,46	3,85	17,78	38,98	Kurang
94	Kabupaten Aceh Barat Daya	Kabupaten	10,00	4,80	0,00	1,00	0,00	3,89	8,18	35,56	63,43	Cukup
95	Kabupaten Aceh Singkil	Kabupaten	9,37	4,98	0,00	1,00	4,10	4,40	7,50	22,22	53,57	Cukup
96	Kabupaten Aceh Tamiang	Kabupaten	10,00	4,88	0,00	1,00	0,00	4,20	18,75	31,11	69,94	Cukup

**PENILAIAN FINAL INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)**  
**KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda) TAHUN 2023**

No	Nama K/L/PD	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Purchasing	Toko Daring	Non e-Tendering/Non e-Purchasing	e-Kontrak	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ	Total Nilai Pembobotan	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	Kabupaten Gayo Lues	Kabupaten	0,00	3,55	0,00	1,00	4,19	3,65	3,75	0,00	16,14	Kurang
98	Kabupaten Bener Meriah	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	4,21	4,99	15,88	35,56	76,65	Baik
99	Kabupaten Aceh Selatan	Kabupaten	9,39	4,20	0,00	1,00	3,96	3,81	4,00	35,56	61,92	Cukup
100	Kabupaten Aceh Tenggara	Kabupaten	8,32	3,81	0,00	1,00	5,00	4,01	9,13	4,44	35,70	Kurang
101	Kabupaten Aceh Timur	Kabupaten	5,26	4,14	0,00	1,00	0,00	4,20	1,43	13,33	29,37	Kurang
102	Kabupaten Aceh Utara	Kabupaten	10,00	4,83	0,00	1,00	3,21	4,68	10,00	22,22	55,93	Cukup
103	Kabupaten Aceh Barat	Kabupaten	6,06	5,00	0,00	1,00	2,85	4,49	3,21	31,11	53,73	Cukup
104	Kabupaten Aceh Tengah	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	3,08	3,60	4,09	35,56	62,33	Cukup
105	Kabupaten Aceh Besar	Kabupaten	9,08	4,71	0,00	1,00	0,00	2,01	5,63	31,11	53,54	Cukup
106	Kabupaten Aceh Jaya	Kabupaten	6,67	5,00	0,00	1,00	5,00	4,27	9,38	17,78	49,10	Kurang
107	Provinsi Sumatera Utara	Provinsi	10,00	5,00	2,07	1,00	4,05	4,07	15,71	40,00	81,91	Baik
108	Kota Tanjung Balai	Kota	8,72	5,00	0,00	1,00	5,00	4,29	10,91	35,56	70,47	Baik
109	Kota Medan	Kota	10,00	5,00	0,00	1,00	5,00	3,96	5,63	31,11	61,70	Cukup
110	Kota Padang Sidempuan	Kota	10,00	4,92	0,00	1,00	5,00	4,90	24,55	8,89	59,25	Cukup
111	Kota Pematangsiantar	Kota	10,00	3,88	0,00	1,00	2,98	1,24	7,20	35,56	61,86	Cukup
112	Kota Tebing Tinggi	Kota	9,82	4,81	0,00	1,00	3,14	4,95	5,45	26,67	55,85	Cukup
113	Kota Binjai	Kota	8,04	3,87	0,00	1,00	0,00	4,86	9,00	35,56	62,33	Cukup
114	Kota Gunungsitoli	Kota	10,00	5,00	0,00	1,00	5,00	4,29	6,21	35,56	67,06	Cukup
115	Kota Sibolga	Kota	10,00	4,95	0,00	1,00	5,00	3,62	16,16	13,33	54,06	Cukup
116	Kabupaten Labuhan Batu	Kabupaten	10,00	4,98	0,00	1,00	2,86	4,22	11,54	40,00	74,61	Baik
117	Kabupaten Tapanuli Utara	Kabupaten	8,07	4,99	0,00	1,00	2,74	4,65	0,00	22,22	43,67	Kurang
118	Kabupaten Asahan	Kabupaten	9,91	5,00	0,00	1,00	2,80	3,62	13,04	35,56	70,92	Baik
119	Kabupaten Batubara	Kabupaten	10,00	0,00	2,11	1,00	0,00	3,75	22,00	40,00	78,86	Baik
120	Kabupaten Dairi	Kabupaten	10,00	4,54	0,00	1,00	0,00	3,30	3,33	13,33	35,50	Kurang

PENILAIAN FINAL INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)  
KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda) TAHUN 2023

No	Nama K/L/PD	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Purchasing	Toko Daring	Non e-Tendering/Non e-Purchasing	e-Kontrak	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ	Total Nilai Pembobotan	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
121	Kabupaten Deli Serdang	Kabupaten	10,00	3,48	0,00	1,00	0,00	3,37	9,00	35,56	62,41	Cukup
122	Kabupaten Humbang Hasundutan	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	4,36	3,15	5,45	13,33	42,29	Kurang
123	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	Kabupaten	10,00	4,71	0,00	1,00	2,75	4,83	0,00	13,33	36,63	Kurang
124	Kabupaten Mandailing Natal	Kabupaten	9,48	4,60	0,00	1,00	4,70	3,68	2,00	26,67	52,13	Cukup
125	Kabupaten Nias Selatan	Kabupaten	7,98	4,60	0,00	1,00	0,00	4,94	0,00	31,11	49,63	Kurang
126	Kabupaten Padang Lawas	Kabupaten	5,38	5,00	0,00	1,00	0,00	3,48	4,00	26,67	45,53	Kurang
127	Kabupaten Pakpak Bharat	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	2,76	4,25	1,88	17,78	42,67	Kurang
128	Kabupaten Samosir	Kabupaten	10,00	4,78	0,00	1,00	0,00	2,82	8,82	31,11	58,54	Cukup
129	Kabupaten Serdang Bedagai	Kabupaten	10,00	4,75	2,96	1,00	0,00	3,64	2,61	35,56	60,52	Cukup
130	Kabupaten Langkat	Kabupaten	10,00	4,95	0,00	1,00	2,84	2,58	9,13	8,89	39,40	Kurang
131	Kabupaten Toba Samosir	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	2,61	3,36	0,00	4,44	26,41	Kurang
132	Kabupaten Karo	Kabupaten	6,95	3,73	0,00	1,00	0,00	4,50	0,00	4,44	20,63	Kurang
133	Kabupaten Simalungun	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	0,00	4,43	2,73	4,44	27,60	Kurang
134	Kabupaten Nias Barat	Kabupaten	9,50	5,00	0,00	1,00	4,18	2,46	0,00	0,00	22,14	Kurang
135	Kabupaten Tapanuli Tengah	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	0,00	3,04	12,50	8,89	40,43	Kurang
136	Kabupaten Labuhan Batu Utara	Kabupaten	10,00	4,88	0,00	1,00	0,00	4,90	14,12	31,11	66,01	Cukup
137	Kabupaten Nias	Kabupaten	10,00	4,99	0,00	1,00	0,00	3,64	3,16	31,11	53,91	Cukup
138	Kabupaten Nias Utara	Kabupaten	0,00	4,26	0,00	1,00	4,52	3,80	0,00	0,00	13,57	Kurang
139	Kabupaten Tapanuli Selatan	Kabupaten	10,00	4,27	0,00	1,00	0,00	4,38	0,00	4,44	24,10	Kurang
140	Kabupaten Padang Lawas Utara	Kabupaten	5,71	4,94	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65	Kurang
141	Provinsi Sumatera Barat	Provinsi	10,00	5,00	0,00	1,00	3,36	4,13	21,25	40,00	84,74	Baik
142	Kota Sawahlunto	Kota	10,00	4,12	2,97	1,00	5,00	4,23	23,08	35,56	85,96	Baik
143	Kota Padang Panjang	Kota	9,59	4,94	0,00	1,00	5,00	4,84	30,00	35,56	90,93	Sangat Baik
144	Kota Payakumbuh	Kota	10,00	5,00	2,94	1,00	3,54	4,90	15,88	40,00	83,26	Baik

PENILAIAN FINAL INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)  
KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda) TAHUN 2023

No	Nama K/L/PD	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Purchasing	Toko Daring	Non e-Tendering/Non e-Purchasing	e-Kontrak	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ	Total Nilai Pembobotan	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
145	Kota Padang	Kota	10,00	5,00	0,00	1,00	5,00	4,13	12,35	40,00	77,48	Baik
146	Kota Solok	Kota	9,92	4,73	4,00	1,00	3,54	4,75	13,64	40,00	81,58	Baik
147	Kota Bukit Tinggi	Kota	10,00	5,00	0,00	1,00	5,00	4,64	6,82	35,56	68,02	Cukup
148	Kota Pariaman	Kota	10,00	3,69	0,00	1,00	3,06	4,41	10,91	35,56	68,63	Cukup
149	Kabupaten Sijunjung	Kabupaten	10,00	4,95	0,00	1,00	4,30	3,41	7,90	31,11	62,67	Cukup
150	Kabupaten Pesisir Selatan	Kabupaten	10,00	4,98	0,00	1,00	0,00	2,26	16,50	35,56	70,30	Baik
151	Kabupaten Tanah Datar	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	0,00	4,07	16,67	40,00	76,74	Baik
152	Kabupaten Dharmasraya	Kabupaten	10,00	3,25	0,00	1,00	0,00	3,95	7,50	40,00	65,70	Cukup
153	Kabupaten Pasaman	Kabupaten	9,99	4,82	0,00	1,00	4,75	4,22	0,00	26,67	51,45	Cukup
154	Kabupaten Agam	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	2,59	4,95	14,35	40,00	77,89	Baik
155	Kabupaten Padang Pariaman	Kabupaten	7,19	5,00	0,00	1,00	0,00	3,27	14,29	35,56	66,31	Cukup
156	Kabupaten Solok	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	3,92	4,14	13,13	40,00	77,19	Baik
157	Kabupaten Lima Puluh Kota	Kabupaten	7,16	4,39	0,00	1,00	3,51	4,74	17,65	35,56	74,01	Baik
158	Kabupaten Pasaman Barat	Kabupaten	7,43	4,71	0,00	1,00	3,29	3,93	7,90	13,33	41,59	Kurang
159	Kabupaten Solok Selatan	Kabupaten	10,00	4,90	0,00	1,00	3,90	3,85	1,11	35,56	60,32	Cukup
160	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	2,93	4,70	8,75	40,00	72,38	Baik
161	Provinsi Riau	Provinsi	8,59	5,00	0,00	1,00	0,00	4,74	12,69	40,00	72,01	Baik
162	Kota Pekanbaru	Kota	7,80	4,28	0,00	1,00	0,00	3,79	4,80	35,56	57,23	Cukup
163	Kota Dumai	Kota	10,00	4,69	0,00	1,00	5,00	4,83	15,00	35,56	76,09	Baik
164	Kabupaten Kuantan Singingi	Kabupaten	10,00	4,94	0,00	1,00	3,17	4,29	11,05	17,78	52,24	Cukup
165	Kabupaten Indragiri Hilir	Kabupaten	8,08	4,19	0,00	1,00	2,53	4,24	7,78	35,56	63,39	Cukup
166	Kabupaten Kampar	Kabupaten	8,23	4,69	0,00	1,00	0,00	3,36	6,56	26,67	50,50	Cukup
167	Kabupaten Bengkalis	Kabupaten	8,30	5,00	0,00	1,00	3,45	4,17	11,00	17,78	50,70	Cukup
168	Kabupaten Pelalawan	Kabupaten	10,00	3,64	0,00	1,00	0,00	3,29	1,07	35,56	54,56	Cukup

**PENILAIAN FINAL INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)**  
**KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda) TAHUN 2023**

No	Nama K/L/PD	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Purchasing	Toko Daring	Non e-Tendering/Non e-Purchasing	e-Kontrak	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ	Total Nilai Pembobotan	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
L69	Kabupaten Rokan Hulu	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	0,00	3,66	8,57	8,89	37,12	Kurang
L70	Kabupaten Siak	Kabupaten	10,00	4,99	0,00	1,00	0,00	4,10	26,36	35,56	82,01	Baik
L71	Kabupaten Meranti	Kabupaten	8,77	4,59	0,00	1,00	0,00	3,18	1,16	22,22	40,92	Kurang
L72	Kabupaten Rokan Hilir	Kabupaten	10,00	4,96	0,00	1,00	4,34	4,88	7,00	35,56	67,73	Cukup
L73	Kabupaten Indragiri Hulu	Kabupaten	10,00	4,91	0,00	1,00	3,44	4,60	6,82	35,56	66,34	Cukup
L74	Provinsi Jambi	Provinsi	10,00	4,88	0,00	1,00	5,00	3,95	11,71	40,00	76,55	Baik
L75	Kota Jambi	Kota	10,00	5,00	0,00	1,00	2,89	4,14	6,00	40,00	69,03	Cukup
L76	Kota Sungai Penuh	Kota	0,00	4,79	0,00	1,00	5,00	4,96	8,18	13,33	37,25	Kurang
L77	Kabupaten Sarolangun	Kabupaten	10,00	4,18	0,00	1,00	5,00	4,71	5,56	8,89	39,34	Kurang
L78	Kabupaten Batanghari	Kabupaten	8,61	3,89	0,00	1,00	5,00	4,39	0,00	31,11	54,01	Cukup
L79	Kabupaten Kerinci	Kabupaten	10,00	4,92	0,00	1,00	3,80	4,99	10,00	31,11	65,82	Cukup
L80	Kabupaten Muaro Jambi	Kabupaten	9,73	4,87	0,00	1,00	3,13	4,32	12,35	22,22	57,62	Cukup
L81	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Kabupaten	8,59	0,00	0,00	1,00	0,00	4,14	1,71	13,33	28,77	Kurang
L82	Kabupaten Merangin	Kabupaten	9,44	5,00	0,00	1,00	4,31	4,57	1,94	22,22	48,48	Kurang
L83	Kabupaten Tebo	Kabupaten	10,00	4,71	0,00	1,00	0,00	4,35	3,16	22,22	45,44	Kurang
L84	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Kabupaten	10,00	4,91	0,00	1,00	2,71	4,07	12,41	22,22	57,32	Cukup
L85	Kabupaten Bungo	Kabupaten	10,00	4,53	0,00	1,00	0,00	4,31	5,77	22,22	47,84	Kurang
L86	Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi	6,23	4,90	0,00	1,00	5,00	3,99	18,00	40,00	79,12	Baik
L87	Kota Pagar Alam	Kota	10,00	5,00	0,00	1,00	2,97	2,64	8,82	13,33	43,75	Kurang
L88	Kota Palembang	Kota	10,00	4,81	0,00	1,00	3,72	3,56	12,00	40,00	75,08	Baik
L89	Kota Prabumulih	Kota	7,35	4,21	0,00	1,00	5,00	3,15	23,33	35,56	79,60	Baik
L90	Kota Lubuklinggau	Kota	8,63	4,44	0,00	1,00	3,40	3,59	8,18	40,00	69,24	Cukup
L91	Kabupaten Bogor	Kabupaten	10,00	4,72	0,00	1,00	0,00	4,04	23,89	35,56	79,21	Baik
L92	Kabupaten Banyuasin	Kabupaten	0,00	5,00	0,00	1,00	3,88	4,62	6,00	35,56	56,06	Cukup

PENILAIAN FINAL INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)  
KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda) TAHUN 2023

No	Nama K/L/PD	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Purchasing	Toko Daring	Non e-Tendering/Non e-Purchasing	e-Kontrak	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ	Total Nilai Pembobotan	Predikat
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
193	Kabupaten Muara Enim	Kabupaten	7,00	4,91	0,00	1,00	2,71	2,34	6,36	13,33	37,64	Kurang
194	Kabupaten Musi Banyuasin	Kabupaten	10,00	4,80	0,00	1,00	3,76	4,07	12,97	40,00	76,61	Baik
195	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Kabupaten	6,44	4,95	0,00	1,00	4,07	4,79	5,77	40,00	67,01	Cukup
196	Kabupaten Empat Lawang	Kabupaten	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	2,90	0,00	13,33	22,23	Kurang
197	Kabupaten Musi Rawas	Kabupaten	10,00	4,84	0,00	1,00	4,20	4,63	11,74	17,78	54,18	Cukup
198	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Kabupaten	5,84	4,56	0,00	1,00	4,20	4,62	4,61	22,22	47,05	Kurang
199	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Kabupaten	6,66	4,68	0,00	1,00	5,00	4,62	0,00	17,78	39,74	Kurang
200	Kabupaten Ogan Komering Uiu	Kabupaten	8,66	4,77	0,00	1,00	2,59	3,15	22,86	40,00	83,028	Baik
201	Kabupaten Ogan Ilir	Kabupaten	8,09	4,89	0,00	1,00	0,00	4,49	4,61	40,00	63,08	Cukup
202	Kabupaten Lahat	Kabupaten	0,00	4,61	0,00	1,00	4,14	3,16	13,33	4,44	30,68	Kurang
203	Kabupaten Musi Rawas Utara	Kabupaten	10,00	4,86	0,00	1,00	2,51	4,41	0,97	17,78	41,53	Kurang
204	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Kabupaten	9,33	3,65	0,00	1,00	3,46	3,31	10,80	17,78	49,34	Kurang
205	Provinsi Bengkulu	Provinsi	10,00	4,64	0,00	1,00	5,00	4,44	20,23	40,00	85,32	Baik
206	Kota Bengkulu	Kota	10,00	5,00	0,00	1,00	0,00	3,05	15,79	35,56	70,40	Baik
207	Kabupaten Bengkulu Utara	Kabupaten	8,54	4,96	0,00	1,00	0,00	3,49	15,00	22,22	55,21	Cukup
208	Kabupaten Lebong	Kabupaten	10,00	4,36	0,00	1,00	5,00	4,83	4,74	26,67	56,60	Cukup
209	Kabupaten Bengkulu Selatan	Kabupaten	10,00	4,85	0,00	1,00	3,50	4,86	9,55	35,56	69,33	Cukup
210	Kabupaten Muko-Muko	Kabupaten	7,19	3,98	0,00	1,00	0,00	3,60	6,92	13,33	36,02	Kurang
211	Kabupaten Kepahiang	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	0,00	4,26	3,00	13,33	36,59	Kurang
212	Kabupaten Rejang Lebong	Kabupaten	10,00	4,79	0,00	1,00	0,00	4,02	3,00	26,67	49,47	Kurang
213	Kabupaten Bengkulu Tengah	Kabupaten	10,00	4,70	0,00	1,00	0,00	3,37	22,00	35,56	76,63	Baik
214	Kabupaten Kaur	Kabupaten	9,47	4,45	0,00	1,00	4,26	2,53	1,50	17,78	40,98	Kurang
215	Kabupaten Seluma	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	4,30	3,84	8,57	17,78	50,49	Cukup
216	Provinsi Lampung	Provinsi	10,00	3,88	0,00	1,00	0,00	4,09	17,25	35,56	71,78	Baik

PENILAIAN FINAL INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)  
KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda) TAHUN 2023

No	Nama K/L/PD	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Purchasing	Toko Daring	Non e-Tendering/Non e-Purchasing	e-Kontrak	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ	Total Nilai Pembobtan	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
217	Kota Metro	Kota	10,00	5,00	3,76	1,00	4,36	4,20	24,71	26,67	79,69	Baik
218	Kota Bandar Lampung	Kota	9,75	4,43	0,00	1,00	5,00	4,47	5,53	35,56	65,73	Cukup
219	Kabupaten Pesawaran	Kabupaten	10,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,17	17,37	8,89	41,43	Kurang
220	Kabupaten Lampung Selatan	Kabupaten	9,96	4,82	0,00	1,00	0,00	4,89	13,75	13,33	47,75	Kurang
221	Kabupaten Lampung Timur	Kabupaten	10,00	4,68	0,00	1,00	0,00	1,95	8,40	17,78	43,81	Kurang
222	Kabupaten Lampung Barat	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	0,00	1,42	17,78	35,56	70,76	Baik
223	Kabupaten Lampung Utara	Kabupaten	9,85	0,00	0,00	1,00	0,00	1,13	3,16	8,89	24,04	Kurang
224	Kabupaten Way Kanan	Kabupaten	9,88	5,00	0,00	1,00	0,00	4,85	7,20	31,11	59,04	Cukup
225	Kabupaten Lampung Tengah	Kabupaten	10,00	3,75	3,02	1,00	0,00	2,88	22,76	35,56	78,97	Baik
226	Kabupaten Tulang Bawang Barat	Kabupaten	6,75	3,63	0,00	1,00	3,45	4,79	11,43	22,22	53,26	Cukup
227	Kabupaten Tulang Bawang	Kabupaten	9,57	4,86	0,00	1,00	0,00	4,90	11,25	35,56	67,14	Cukup
228	Kabupaten Mesuji	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	0,00	4,41	15,65	35,56	71,62	Baik
229	Kabupaten Tanggamus	Kabupaten	5,52	4,44	0,00	1,00	0,00	3,90	5,00	13,33	33,20	Kurang
230	Kabupaten Pringsewu	Kabupaten	10,00	4,68	2,73	1,00	0,00	4,74	10,91	35,56	69,62	Cukup
231	Kabupaten Pesisir Barat	Kabupaten	10,00	4,21	0,00	1,00	0,00	4,60	4,29	8,89	32,99	Kurang
232	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi	10,00	4,75	0,00	1,00	0,00	4,18	15,33	40,00	75,26	Baik
233	Kota Pangkal Pinang	Kota	10,00	4,68	0,00	1,00	0,00	4,00	23,75	40,00	83,43	Baik
234	Kabupaten Bangka	Kabupaten	9,00	4,84	0,00	1,00	3,43	4,29	9,75	40,00	72,31	Baik
235	Kabupaten Bangka Tengah	Kabupaten	10,00	4,81	0,00	1,00	0,00	4,13	30,00	35,56	85,50	Baik
236	Kabupaten Bangka Selatan	Kabupaten	10,00	4,96	0,00	1,00	0,00	2,13	0,00	13,33	31,42	Kurang
237	Kabupaten Belitung	Kabupaten	10,00	4,91	0,00	1,00	2,90	4,78	8,82	40,00	72,40	Baik
238	Kabupaten Belitung Timur	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	2,88	4,44	20,00	35,56	78,88	Baik
239	Kabupaten Bangka Barat	Kabupaten	6,50	5,00	0,00	1,00	0,00	4,15	19,29	35,56	71,49	Baik
240	Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi	10,00	5,00	2,78	1,00	5,00	4,16	22,17	40,00	90,11	Sangat Baik

**PENILAIAN FINAL INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)**  
**KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda) TAHUN 2023**

No	Nama K/L/PD	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Purchasing	Toko Daring	Non e-Tendering/Non e-Purchasing	e-Kontrak	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ	Total Nilai Pembobotan	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
241	Kota Batam	Kota	10,00	5,00	2,24	1,00	5,00	4,69	18,00	40,00	85,93	Baik
242	Kota Tanjung Pinang	Kota	10,00	4,28	0,00	1,00	5,00	4,66	8,75	35,56	69,25	Cukup
243	Kabupaten Karimun	Kabupaten	10,00	4,26	0,00	1,00	3,27	4,24	16,07	40,00	78,84	Baik
244	Kabupaten Natuna	Kabupaten	10,00	3,15	0,00	1,00	0,00	4,96	12,41	31,11	62,63	Cukup
245	Kabupaten Lingga	Kabupaten	9,82	4,61	0,00	1,00	0,00	4,96	13,85	40,00	74,24	Baik
246	Kabupaten Bintan	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	0,00	4,19	9,13	35,56	64,88	Cukup
247	Kabupaten Kepulauan Anambas	Kabupaten	10,00	3,29	0,00	1,00	0,00	3,75	19,00	35,56	72,60	Baik
248	Provinsi DKI Jakarta	Provinsi	10,00	5,00	0,00	1,00	0,00	4,69	12,31	40,00	73,00	Baik
249	Provinsi Jawa Barat	Provinsi	9,92	4,93	0,00	1,00	0,00	4,63	20,60	40,00	81,08	Baik
250	Kota Bogor	Kota	10,00	5,00	3,99	1,00	3,48	4,97	8,46	40,00	76,90	Baik
251	Kota Sukabumi	Kota	10,00	4,00	0,00	1,00	2,72	4,96	10,50	35,56	68,75	Cukup
252	Kota Cimahi	Kota	10,00	4,63	0,00	1,00	2,55	3,34	7,78	40,00	69,31	Cukup
253	Kota Cirebon	Kota	10,00	3,09	0,00	1,00	5,00	4,09	15,41	26,67	65,25	Cukup
254	Kota Tasikmalaya	Kota	9,47	4,43	0,00	1,00	3,07	4,94	7,74	22,22	52,86	Cukup
255	Kota Bekasi	Kota	10,00	4,62	0,00	1,00	3,80	4,21	20,00	40,00	83,62	Baik
256	Kota Banjar	Kota	10,00	5,00	0,00	1,00	4,13	4,90	5,77	35,56	66,36	Cukup
257	Kota Depok	Kota	10,00	5,00	0,00	1,00	0,00	3,94	14,73	40,00	74,66	Baik
258	Kota Bandung	Kota	9,36	4,51	0,00	1,00	0,00	4,44	18,84	40,00	78,16	Baik
259	Kabupaten Majalengka	Kabupaten	10,00	4,96	0,00	1,00	0,00	4,10	9,23	40,00	69,29	Cukup
260	Kabupaten Bandung Barat	Kabupaten	5,39	2,97	0,00	1,00	4,21	4,96	16,67	40,00	75,19	Baik
261	Kabupaten Cirebon	Kabupaten	8,25	4,96	0,00	1,00	0,00	4,70	6,56	35,56	61,03	Cukup
262	Kabupaten Garut	Kabupaten	10,00	4,65	0,00	1,00	3,73	4,35	18,00	40,00	81,73	Baik
263	Kabupaten Kuningan	Kabupaten	9,60	4,72	0,00	1,00	3,34	4,97	20,77	40,00	84,41	Baik
264	Kabupaten Bandung	Kabupaten	9,88	4,64	0,00	1,00	0,00	3,74	6,67	35,56	61,49	Cukup

**PENILAIAN FINAL INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)**  
**KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda) TAHUN 2023**

No	Nama K/L/PD	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Purchasing	Toko Daring	Non e-Tendering/Non e-Purchasing	e-Kontrak	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ	Total Nilai Pembobotan	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
265	Kabupaten Purwakarta	Kabupaten	9,33	4,78	2,14	1,00	5,00	4,32	16,67	13,33	56,58	Cukup
266	Kabupaten Tasikmalaya	Kabupaten	5,86	4,79	0,00	1,00	0,00	4,73	2,50	35,56	54,44	Cukup
267	Kabupaten Bekasi	Kabupaten	9,63	5,00	0,00	1,00	3,68	4,27	18,00	35,56	77,13	Baik
268	Kabupaten Ciamis	Kabupaten	10,00	4,43	0,00	1,00	0,00	4,70	13,50	40,00	73,63	Baik
269	Kabupaten Cianjur	Kabupaten	10,00	4,83	0,00	1,00	3,38	4,47	6,67	40,00	70,36	Baik
270	Kabupaten Sumedang	Kabupaten	10,00	4,78	0,00	1,00	3,39	4,98	2,57	35,56	62,28	Cukup
271	Kabupaten Subang	Kabupaten	10,00	4,93	0,00	1,00	4,17	4,19	18,18	40,00	82,47	Baik
272	Kabupaten Sukabumi	Kabupaten	10,00	4,75	0,00	1,00	3,62	4,13	18,57	31,11	73,19	Baik
273	Kabupaten Pangandaran	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	3,68	4,55	21,00	35,56	80,79	Baik
274	Kabupaten Indramayu	Kabupaten	5,25	5,00	0,00	1,00	3,61	3,75	1,31	22,22	42,14	Kurang
275	Kabupaten Karawang	Kabupaten	10,00	4,51	0,00	1,00	0,00	4,04	13,64	35,56	68,75	Cukup
276	Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	10,00	5,00	0,00	1,00	3,73	4,96	19,86	40,00	84,55	Baik
277	Kota Tegal	Kota	10,00	4,63	0,00	1,00	5,00	4,91	11,05	35,56	72,14	Baik
278	Kota Semarang	Kota	10,00	4,98	0,00	1,00	3,10	4,34	14,12	35,56	73,10	Baik
279	Kota Pekalongan	Kota	10,00	3,59	0,00	1,00	3,77	4,75	20,00	31,11	74,21	Baik
280	Kota Surakarta	Kota	9,83	5,00	0,00	1,00	0,00	4,38	8,11	40,00	68,32	Cukup
281	Kota Salatiga	Kota	10,00	5,00	0,00	1,00	0,00	4,04	12,63	40,00	72,67	Baik
282	Kota Magelang	Kota	10,00	4,97	3,15	1,00	0,00	2,80	20,00	40,00	81,92	Baik
283	Kabupaten Brebes	Kabupaten	10,00	4,74	0,00	1,00	2,77	4,28	18,00	40,00	80,78	Baik
284	Kabupaten Banyumas	Kabupaten	10,00	4,96	0,00	1,00	0,00	4,14	7,27	35,56	62,93	Cukup
285	Kabupaten Karanganyar	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	0,00	3,16	11,79	17,78	48,73	Kurang
286	Kabupaten Blora	Kabupaten	10,00	4,97	0,00	1,00	0,00	4,44	25,00	35,56	80,97	Baik
287	Kabupaten Kebumen	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	0,00	4,44	17,42	35,56	73,42	Baik
288	Kabupaten Purworejo	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	2,79	4,44	13,20	31,11	67,53	Cukup

PENILAIAN FINAL INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)  
KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda) TAHUN 2023

No	Nama K/L/PD	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Purchasing	Toko Daring	Non e-Tendering/Non e-Purchasing	e-Kontrak	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ	Total Nilai Pembobtan	Predikat
289	Kabupaten Banjarnegara	Kabupaten	10,00	3,55	0,00	1,00	3,79	4,41	6,56	35,56	64,87	Cukup
290	Kabupaten Pekalongan	Kabupaten	10,00	4,79	0,00	1,00	3,02	4,10	15,52	35,56	73,99	Baik
291	Kabupaten Pemalang	Kabupaten	10,00	4,65	0,00	1,00	3,48	3,70	12,19	35,56	70,58	Baik
292	Kabupaten Jepara	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	4,70	4,88	23,00	35,56	84,14	Baik
293	Kabupaten Cilacap	Kabupaten	10,00	4,97	0,00	1,00	2,99	4,88	2,31	35,56	61,72	Cukup
294	Kabupaten Batang	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	0,00	4,36	13,04	40,00	73,40	Baik
295	Kabupaten Boyolali	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	2,71	4,32	16,50	35,56	75,09	Baik
296	Kabupaten Semarang	Kabupaten	9,69	4,81	0,00	1,00	4,22	4,81	8,40	35,56	68,49	Cukup
297	Kabupaten Slragen	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	0,00	5,00	2,40	40,00	63,40	Cukup
298	Kabupaten Temanggung	Kabupaten	10,00	4,96	0,00	1,00	4,77	3,82	13,20	40,00	77,75	Baik
299	Kabupaten Klaten	Kabupaten	10,00	4,80	0,00	1,00	0,00	4,39	4,44	35,56	60,19	Cukup
300	Kabupaten Tegal	Kabupaten	8,29	4,94	0,00	1,00	0,00	4,23	16,92	40,00	75,38	Baik
301	Kabupaten Grobogan	Kabupaten	10,00	4,74	0,00	1,00	4,39	4,69	11,47	35,56	71,85	Baik
302	Kabupaten Kudus	Kabupaten	10,00	4,71	0,00	1,00	2,64	4,74	21,25	35,56	79,90	Baik
303	Kabupaten Magelang	Kabupaten	10,00	4,56	0,00	1,00	0,00	4,40	18,89	35,56	74,41	Baik
304	Kabupaten Purbalingga	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	2,92	4,00	4,44	35,56	62,91	Cukup
305	Kabupaten Sukoharjo	Kabupaten	10,00	5,00	2,69	1,00	2,96	4,20	6,00	40,00	71,85	Baik
306	Kabupaten Wonosobo	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	0,00	4,94	13,20	35,56	69,70	Cukup
307	Kabupaten Wonogiri	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	0,00	4,82	11,61	35,56	67,99	Cukup
308	Kabupaten Demak	Kabupaten	10,00	4,90	0,00	1,00	4,61	4,40	10,77	35,56	71,25	Baik
309	Kabupaten Kendal	Kabupaten	10,00	2,93	0,00	1,00	0,00	4,43	17,65	17,78	53,79	Cukup
310	Kabupaten Pati	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	0,00	4,69	12,73	40,00	73,42	Baik
311	Kabupaten Rembang	Kabupaten	8,44	4,71	0,00	1,00	2,95	4,62	11,25	35,56	68,53	Cukup
312	Provinsi D. I. Yogyakarta	Provinsi	9,99	5,00	3,15	1,00	5,00	4,91	19,33	40,00	88,37	Baik

PENILAIAN FINAL INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)  
KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda) TAHUN 2023

No	Nama K/L/PD	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Purchasing	Toko Daring	Non e-Tendering/Non e-Purchasing	e-Kontrak	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBj	Tingkat Kematangan UKPBj	Total Nilai Pembobotan	Predikat
313	Kota Yogyakarta	Kota	10,00	5,00	0,00	1,00	0,00	4,40	16,67	40,00	77,07	Baik
314	Kabupaten Gunung Kidul	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	3,71	4,50	12,19	35,56	71,97	Baik
315	Kabupaten Kulon Progo	Kabupaten	10,00	4,80	0,00	1,00	0,00	4,57	16,25	35,56	72,18	Baik
316	Kabupaten Sleman	Kabupaten	10,00	4,99	0,00	1,00	0,00	4,09	14,08	40,00	74,16	Baik
317	Kabupaten Bantul	Kabupaten	10,00	4,59	0,00	1,00	0,00	4,96	9,13	35,56	65,24	Cukup
318	Provinsi Jawa Timur	Provinsi	10,00	5,00	0,00	1,00	2,92	4,42	13,73	40,00	77,07	Baik
319	Kota Batu	Kota	10,00	4,72	0,00	1,00	4,27	4,84	9,00	31,11	64,94	Cukup
320	Kota Blitar	Kota	10,00	5,00	2,24	1,00	3,91	4,90	13,20	35,56	75,82	Baik
321	Kota Madiun	Kota	9,96	5,00	2,93	1,00	0,00	4,76	10,00	40,00	73,65	Baik
322	Kota Malang	Kota	10,00	4,01	0,00	1,00	0,00	4,64	22,80	35,56	78,00	Baik
323	Kota Surabaya	Kota	10,00	5,00	0,00	1,00	3,31	5,00	8,04	35,56	67,91	Cukup
324	Kota Mojokerto	Kota	10,00	5,00	3,02	1,00	5,00	4,36	9,38	40,00	77,76	Baik
325	Kota Kediri	Kota	9,79	5,00	0,00	1,00	3,41	4,87	23,75	35,56	83,37	Baik
326	Kota Probolinggo	Kota	10,00	5,00	0,00	1,00	5,00	4,21	22,76	31,11	79,08	Baik
327	Kota Pasuruan	Kota	10,00	4,94	2,15	0,00	0,00	4,92	12,50	26,67	61,18	Cukup
328	Kabupaten Banyuwangi	Kabupaten	10,00	5,00	2,93	1,00	3,76	4,67	7,09	40,00	74,45	Baik
329	Kabupaten Sidoarjo	Kabupaten	10,00	4,94	0,00	1,00	0,00	4,79	3,89	35,56	60,17	Cukup
330	Kabupaten Madiun	Kabupaten	9,66	4,98	0,00	0,00	3,25	4,46	7,78	40,00	70,12	Baik
331	Kabupaten Sumenep	Kabupaten	8,07	3,89	0,00	1,00	4,41	3,57	2,65	35,56	59,15	Cukup
332	Kabupaten Pacitan	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	2,91	4,68	6,52	35,56	65,67	Cukup
333	Kabupaten Jombang	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	0,00	3,94	13,13	40,00	73,07	Baik
334	Kabupaten Magetan	Kabupaten	10,00	5,00	2,60	1,00	2,65	4,47	9,43	40,00	75,15	Baik
335	Kabupaten Malang	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	5,00	4,92	13,09	35,56	74,57	Baik
336	Kabupaten Nganjuk	Kabupaten	10,00	4,93	0,00	1,00	4,38	4,08	9,60	35,56	69,55	Cukup

**PENILAIAN FINAL INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)**  
**KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda) TAHUN 2023**

No	Nama K/L/PD	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Purchasing	Toko Daring	Non e-Tendering/Non e-Purchasing	e-Kontrak	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ	Total Nilai Pembobotan	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
337	Kabupaten Gresik	Kabupaten	9,72	5,00	2,17	1,00	3,55	4,39	13,71	40,00	79,55	Baik
338	Kabupaten Blitar	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	5,00	4,75	17,59	40,00	83,34	Baik
339	Kabupaten Mojokerto	Kabupaten	10,00	4,92	2,39	1,00	0,00	3,82	13,24	40,00	75,37	Baik
340	Kabupaten Bojonegoro	Kabupaten	9,93	4,45	0,00	1,00	4,25	4,24	13,47	40,00	77,34	Baik
341	Kabupaten Jember	Kabupaten	10,00	4,78	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	8,89	27,60	Kurang
342	Kabupaten Kediri	Kabupaten	9,89	4,23	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	26,67	44,74	Kurang
343	Kabupaten Lamongan	Kabupaten	10,00	4,93	0,00	1,00	3,41	4,34	2,73	26,67	53,08	Cukup
344	Kabupaten Ngawi	Kabupaten	10,00	4,94	2,05	0,00	3,10	4,64	19,61	40,00	84,33	Baik
345	Kabupaten Situbondo	Kabupaten	10,00	4,69	0,00	1,00	3,18	5,00	10,71	35,56	70,14	Baik
346	Kabupaten Probolinggo	Kabupaten	9,71	4,28	0,00	1,00	4,22	4,72	15,52	31,11	70,57	Baik
347	Kabupaten Lumajang	Kabupaten	9,97	4,91	0,00	0,00	0,00	4,81	5,56	31,11	56,36	Cukup
348	Kabupaten Pasuruan	Kabupaten	10,00	4,96	0,00	1,00	3,43	4,02	8,05	35,56	67,01	Cukup
349	Kabupaten Sampang	Kabupaten	10,00	2,81	0,00	0,00	0,00	4,22	3,75	26,67	47,45	Kurang
350	Kabupaten Tuban	Kabupaten	9,95	5,00	0,00	0,00	0,00	4,27	10,00	35,56	64,78	Cukup
351	Kabupaten Bondowoso	Kabupaten	7,26	4,76	0,00	1,00	2,87	3,85	5,45	13,33	38,52	Kurang
352	Kabupaten Trenggalek	Kabupaten	9,95	5,00	0,00	1,00	3,31	4,64	10,31	35,56	69,78	Cukup
353	Kabupaten Pamekasan	Kabupaten	10,00	3,86	0,00	0,00	0,00	4,98	7,71	35,56	62,11	Cukup
354	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten	9,85	4,62	0,00	0,00	0,00	3,71	12,50	35,56	66,23	Cukup
355	Kabupaten Bangkalan	Kabupaten	9,07	5,00	0,00	1,00	2,85	4,32	0,00	8,89	31,12	Kurang
356	Kabupaten Ponorogo	Kabupaten	9,85	3,67	0,00	1,00	0,00	4,00	6,92	31,11	56,55	Cukup
357	Provinsi Banten	Provinsi	10,00	3,64	0,00	1,00	4,83	3,69	25,43	40,00	88,59	Baik
358	Kota Tangerang	Kota	10,00	3,85	2,86	1,00	5,00	4,78	26,59	40,00	94,07	Sangat Baik
359	Kota Serang	Kota	10,00	4,37	0,00	0,00	0,00	3,90	10,43	17,78	46,48	Kurang
360	Kota Tangerang Selatan	Kota	7,06	5,00	0,00	1,00	2,85	4,06	9,55	35,56	65,08	Cukup

PENILAIAN FINAL INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)  
KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda) TAHUN 2023

No	Nama K/L/PD	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Purchasing	Toko Daring	Non e-Tendering/Non e-Purchasing	e-Kontrak	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ	Total Nilai Pembobotan	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
361	Kota Cilegon	Kota	10,00	4,17	0,00	1,00	4,36	3,27	19,00	0,00	41,80	Kurang
362	Kabupaten Lebak	Kabupaten	9,80	4,82	0,00	1,00	0,00	4,04	15,48	40,00	75,14	Baik
363	Kabupaten Serang	Kabupaten	10,00	4,78	0,00	0,00	0,00	4,13	19,74	40,00	78,64	Baik
364	Kabupaten Tangerang	Kabupaten	7,03	4,96	0,00	1,00	0,00	4,37	30,00	40,00	87,36	Baik
365	Kabupaten Pandeglang	Kabupaten	9,08	4,94	0,00	0,00	0,00	4,00	27,19	40,00	85,21	Baik
366	Provinsi Bali	Provinsi	10,00	5,00	3,41	1,00	2,56	4,48	23,48	40,00	89,93	Baik
367	Kota Denpasar	Kota	10,00	4,77	3,15	1,00	3,53	4,81	10,29	40,00	77,55	Baik
368	Kabupaten Badung	Kabupaten	10,00	4,74	3,20	1,00	5,00	4,79	27,80	40,00	96,53	Sangat Baik
369	Kabupaten Jembrana	Kabupaten	10,00	5,00	2,15	1,00	0,00	4,83	30,00	35,56	88,54	Baik
370	Kabupaten Bangli	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	0,00	4,88	18,26	35,56	74,70	Baik
371	Kabupaten Buleleng	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	0,00	4,40	23,44	40,00	83,84	Baik
372	Kabupaten Gianyar	Kabupaten	10,00	4,00	2,98	1,00	0,00	4,99	20,45	40,00	83,41	Baik
373	Kabupaten Klungkung	Kabupaten	10,00	5,00	3,09	1,00	5,00	5,00	30,00	40,00	99,09	Sangat Baik
374	Kabupaten Tabanan	Kabupaten	10,00	4,15	0,00	1,00	5,00	4,19	19,66	35,56	79,55	Baik
375	Kabupaten Karangasem	Kabupaten	10,00	4,97	0,00	1,00	2,65	4,99	4,09	35,56	63,27	Cukup
376	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi	10,00	4,37	0,00	1,00	3,24	4,62	19,09	40,00	82,31	Baik
377	Kota Mataram	Kota	10,00	4,17	0,00	0,00	5,00	3,33	10,50	40,00	73,00	Baik
378	Kota Bima	Kota	10,00	4,06	0,00	0,00	5,00	3,91	28,00	40,00	90,97	Sangat Baik
379	Kabupaten Sumbawa Barat	Kabupaten	9,46	5,00	0,00	0,00	0,00	4,02	4,80	22,22	45,49	Kurang
380	Kabupaten Sumbawa	Kabupaten	6,59	5,00	0,00	0,00	0,00	2,00	28,64	35,56	77,79	Baik
381	Kabupaten Lombok Tengah	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	0,00	2,51	4,22	13,64	40,00	75,37	Baik
382	Kabupaten Lombok Timur	Kabupaten	8,13	4,00	0,00	0,00	0,00	1,96	2,07	35,56	51,72	Cukup
383	Kabupaten Lombok Barat	Kabupaten	10,00	4,43	0,00	0,00	0,00	1,74	11,79	35,56	63,52	Cukup
384	Kabupaten Lombok Utara	Kabupaten	10,00	4,95	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	17,78	33,92	Kurang

PENILAIAN FINAL INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)  
KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda) TAHUN 2023

No	Nama K/L/PD	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Purchasing	Toko Daring	Non e-Tendering/Non e-Purchasing	e-Kontrak	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ	Total Nilai Pembobotan	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
385	Kabupaten Bima	Kabupaten	10,00	4,81	0,00	0,00	0,00	1,47	6,43	17,78	40,49	Kurang
386	Kabupaten Dompu	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	0,00	3,33	6,00	31,11	56,44	Cukup
387	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi	10,00	3,84	0,00	1,00	0,00	3,59	10,00	35,56	63,99	Cukup
388	Kota Kupang	Kota	10,00	4,14	0,00	1,00	5,00	3,92	6,92	22,22	53,20	Cukup
389	Kabupaten Ende	Kabupaten	10,00	2,57	0,00	0,00	0,00	3,01	3,53	13,33	32,44	Kurang
390	Kabupaten Sumba Barat	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	0,00	0,00	4,39	0,00	0,00	19,39	Kurang
391	Kabupaten Sumba Barat Daya	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00	19,16	Kurang
392	Kabupaten Belu	Kabupaten	10,00	4,59	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00	17,78	37,30	Kurang
393	Kabupaten Timor Tengah Utara	Kabupaten	0,00	5,00	0,00	0,00	4,11	4,33	0,00	13,33	26,77	Kurang
394	Kabupaten Manggarai	Kabupaten	10,00	0,00	0,00	0,00	2,51	4,66	0,00	13,33	30,49	Kurang
395	Kabupaten Alor	Kabupaten	5,60	5,00	0,00	0,00	0,00	4,32	22,50	17,78	55,20	Cukup
396	Kabupaten Manggarai Barat	Kabupaten	10,00	4,84	0,00	0,00	3,98	4,92	0,00	8,89	32,63	Kurang
397	Kabupaten Kupang	Kabupaten	10,00	4,78	0,00	0,00	3,94	4,36	15,00	31,11	69,18	Cukup
398	Kabupaten Rote Ndao	Kabupaten	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01	8,82	13,33	36,16	Kurang
399	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	0,00	0,00	3,44	19,09	22,22	59,75	Cukup
400	Kabupaten Ngada	Kabupaten	9,23	4,13	0,00	0,00	0,00	4,89	0,00	8,89	27,14	Kurang
401	Kabupaten Nagekeo	Kabupaten	9,62	4,72	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	17,78	36,16	Kurang
402	Kabupaten Manggarai Timur	Kabupaten	9,02	2,58	0,00	0,00	0,00	4,84	0,00	8,89	25,33	Kurang
403	Kabupaten Sikka	Kabupaten	10,00	0,00	0,00	0,00	3,72	4,51	7,50	35,56	61,29	Cukup
404	Kabupaten Sumba Tengah	Kabupaten	0,00	5,00	0,00	0,00	3,54	4,86	0,00	0,00	13,40	Kurang
405	Kabupaten Sumba Timur	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	0,00	18,36	Kurang
406	Kabupaten Flores Timur	Kabupaten	0,00	4,89	0,00	0,00	4,20	3,40	6,00	8,89	27,38	Kurang
407	Kabupaten Lembata	Kabupaten	6,58	4,77	0,00	0,00	5,00	4,52	12,00	8,89	41,76	Kurang
408	Kabupaten Sabu Raijua	Kabupaten	10,00	4,33	0,00	0,00	0,00	4,47	0,00	0,00	18,80	Kurang

PENILAIAN FINAL INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)  
KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda) TAHUN 2023

No	Nama K/L/PD	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Purchasing	Toko Daring	Non e-Tendering/Non e-Purchasing	e-Kontrak	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBj	Tingkat Kemajuan UKPBj	Total Nilai Pembobtan	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
409	Kabupaten Malaka	Kabupaten	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00	4,44	14,00	Kurang
410	Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi	10,00	5,00	0,00	1,00	5,00	3,86	18,51	40,00	83,37	Baik
411	Kota Pontianak	Kota	10,00	5,00	0,00	1,00	0,00	2,94	7,24	35,56	61,74	Cukup
412	Kota Singkawang	Kota	10,00	5,00	2,75	1,00	5,00	4,93	14,21	35,56	78,45	Baik
413	Kabupaten Sekadau	Kabupaten	7,08	5,00	0,00	0,00	0,00	4,86	2,86	17,78	37,57	Kurang
414	Kabupaten Ketapang	Kabupaten	9,44	4,05	0,00	0,00	3,96	4,81	8,71	35,56	66,53	Cukup
415	Kabupaten Kubu Raya	Kabupaten	9,58	4,69	0,00	1,00	0,00	4,07	27,50	35,56	82,41	Baik
416	Kabupaten Sanggau	Kabupaten	10,00	4,93	2,75	1,00	3,94	4,72	22,26	40,00	89,60	Baik
417	Kabupaten Landak	Kabupaten	10,00	4,75	0,00	1,00	3,10	2,84	7,83	22,22	51,75	Cukup
418	Kabupaten Bengkayang	Kabupaten	9,54	5,00	0,00	1,00	2,82	3,82	18,46	31,11	71,75	Baik
419	Kabupaten Kayong Utara	Kabupaten	7,93	4,29	0,00	0,00	2,96	4,73	11,67	17,78	49,36	Kurang
420	Kabupaten Sambas	Kabupaten	10,00	4,70	0,00	1,00	0,00	4,49	15,00	35,56	70,74	Baik
421	Kabupaten Kapuas Hulu	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	3,02	4,60	6,43	35,56	65,61	Cukup
422	Kabupaten Melawi	Kabupaten	9,53	4,84	0,00	1,00	0,00	3,70	8,00	17,78	44,85	Kurang
423	Kabupaten Sintang	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	0,00	0,00	4,99	28,80	35,56	84,35	Baik
424	Kabupaten Mempawah	Kabupaten	10,00	4,81	0,00	1,00	3,12	4,31	12,35	13,33	48,92	Kurang
425	Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi	10,00	4,73	0,00	1,00	4,03	3,72	16,50	35,56	75,55	Baik
426	Kota Palangka Raya	Kota	10,00	2,82	0,00	1,00	0,00	3,67	12,86	40,00	70,35	Baik
427	Kabupaten Kotawaringin Timur	Kabupaten	10,00	5,00	2,27	1,00	3,04	4,15	12,41	35,56	73,43	Baik
428	Kabupaten Kotawaringin Barat	Kabupaten	10,00	4,11	0,00	1,00	3,48	4,58	7,86	35,56	66,58	Cukup
429	Kabupaten Lamandau	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	0,00	3,89	4,78	9,00	35,56	68,22	Cukup
430	Kabupaten Seruyan	Kabupaten	10,00	3,99	0,00	0,00	3,09	4,75	6,75	4,44	33,02	Kurang
431	Kabupaten Barito Utara	Kabupaten	7,19	5,00	0,00	0,00	3,26	4,18	6,92	35,56	62,12	Cukup
432	Kabupaten Barito Selatan	Kabupaten	10,00	4,85	0,00	0,00	2,50	4,35	24,55	40,00	86,25	Baik

**PENILAIAN FINAL INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)**  
**KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda) TAHUN 2023**

No	Nama K/L/PD	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Purchasing	Toko Daring	Non e-Tendering/Non e-Purchasing	e-Kontrak	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ	Total Nilai Pembobotan	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
433	Kabupaten Barito Timur	Kabupaten	8,00	4,45	0,00	0,00	5,00	4,92	22,50	26,67	71,54	Baik
434	Kabupaten Gunung Mas	Kabupaten	9,69	3,07	0,00	1,00	0,00	3,62	9,38	35,56	62,32	Cukup
435	Kabupaten Katingan	Kabupaten	9,07	5,00	0,00	1,00	2,86	4,35	16,76	35,56	74,59	Baik
436	Kabupaten Sukamara	Kabupaten	10,00	4,24	0,00	1,00	4,14	4,10	11,25	0,00	34,73	Kurang
437	Kabupaten Pulang Pisau	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	0,00	0,00	3,67	6,77	4,44	29,88	Kurang
438	Kabupaten Kapuas	Kabupaten	10,00	4,81	0,00	0,00	2,99	4,45	1,37	8,89	32,51	Kurang
439	Kabupaten Murung Raya	Kabupaten	10,00	4,96	0,00	0,00	3,33	4,94	30,00	17,78	71,01	Baik
440	Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi	9,99	4,93	3,61	1,00	5,00	4,68	21,00	40,00	90,21	Sangat Baik
441	Kota Banjarmasin	Kota	9,96	5,00	0,00	1,00	2,62	4,75	15,00	35,56	73,90	Baik
442	Kota Banjarbaru	Kota	10,00	4,99	0,00	1,00	5,00	4,59	14,35	35,56	75,49	Baik
443	Kabupaten Banjar	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	0,00	4,96	15,60	40,00	76,56	Baik
444	Kabupaten Balangan	Kabupaten	10,00	4,05	0,00	1,00	3,57	3,04	5,22	35,56	62,44	Cukup
445	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kabupaten	10,00	0,00	2,10	0,00	0,00	3,64	10,59	40,00	66,33	Cukup
446	Kabupaten Tanah Laut	Kabupaten	10,00	4,99	0,00	1,00	3,09	4,44	17,31	40,00	80,83	Baik
447	Kabupaten Tabalong	Kabupaten	10,00	4,28	0,00	1,00	3,53	4,74	14,45	35,56	73,55	Baik
448	Kabupaten Tapin	Kabupaten	10,00	4,18	0,00	1,00	0,00	4,86	17,73	35,56	73,32	Baik
449	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	2,95	4,94	19,20	35,56	78,65	Baik
450	Kabupaten Tanah Bumbu	Kabupaten	10,00	3,90	0,00	0,00	0,00	3,83	11,00	35,56	64,29	Cukup
451	Kabupaten Barito Kuala	Kabupaten	10,00	4,97	0,00	1,00	3,12	4,18	9,23	35,56	68,06	Cukup
452	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Kabupaten	9,96	3,82	0,00	1,00	0,00	3,55	20,87	40,00	79,20	Baik
453	Kabupaten Kotabaru	Kabupaten	10,00	3,63	0,00	1,00	2,73	3,38	12,22	35,56	68,52	Cukup
454	Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	10,00	4,42	0,00	1,00	0,00	4,30	15,28	35,56	70,55	Baik
455	Kota Samarinda	Kota	9,61	4,94	0,00	1,00	0,00	4,05	6,25	35,56	61,41	Cukup
456	Kota Balikpapan	Kota	9,28	5,00	0,00	0,00	2,52	4,41	10,46	26,67	58,34	Cukup

PENILAIAN FINAL INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)  
KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda) TAHUN 2023

No	Nama K/L/PD	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Purchasing	Toko Daring	Non e-Tendering/Non e-Purchasing	e-Kontrak	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ	Total Nilai Pembobotan	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
457	Kota Bontang	Kota	9,85	4,41	0,00	1,00	5,00	3,47	7,94	35,56	67,23	Cukup
458	Kabupaten Berau	Kabupaten	9,63	5,00	0,00	0,00	3,52	3,37	10,39	40,00	71,91	Baik
459	Kabupaten Penajam Paser Utara	Kabupaten	8,59	5,00	0,00	1,00	0,00	3,22	7,83	22,22	47,86	Kurang
460	Kabupaten Kutai Kartanegara	Kabupaten	10,00	4,92	2,28	1,00	4,12	4,29	18,13	40,00	84,74	Baik
461	Kabupaten Paser	Kabupaten	9,03	4,74	0,00	1,00	3,13	3,82	5,00	35,56	62,27	Cukup
462	Kabupaten Kutai Timur	Kabupaten	10,00	4,37	0,00	1,00	3,29	4,61	10,00	40,00	73,27	Baik
463	Kabupaten Kutai Barat	Kabupaten	9,20	4,29	0,00	1,00	0,00	4,51	10,64	35,56	65,20	Cukup
464	Kabupaten Mahakam Ulu	Kabupaten	7,86	4,55	0,00	0,00	0,00	4,51	0,00	0,00	16,92	Kurang
465	Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi	9,92	3,77	0,00	1,00	5,00	4,59	12,39	40,00	76,67	Baik
466	Kota Kotamobagu	Kota	10,00	5,00	0,00	0,00	5,00	3,67	9,00	35,56	68,23	Cukup
467	Kota Tomohon	Kota	10,00	0,00	0,00	0,00	2,68	4,67	6,00	22,22	45,57	Kurang
468	Kota Manado	Kota	6,98	4,91	0,00	0,00	5,00	2,93	1,31	8,89	30,03	Kurang
469	Kota Bitung	Kota	10,00	4,69	0,00	0,00	2,62	2,79	0,00	31,11	51,21	Cukup
470	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	0,00	0,00	4,66	2,73	26,67	49,06	Kurang
471	Kabupaten Minahasa Utara	Kabupaten	10,00	5,00	4,00	1,00	3,17	5,00	22,50	40,00	90,67	Sangat Baik
472	Kabupaten Minahasa Tenggara	Kabupaten	9,98	5,00	0,00	0,00	0,00	2,82	13,64	31,11	62,55	Cukup
473	Kabupaten Bolaang Mongondow	Kabupaten	10,00	4,79	2,00	1,00	3,52	4,37	4,50	31,11	61,28	Cukup
474	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Kabupaten	10,00	4,87	0,00	0,00	0,00	4,43	2,73	8,89	30,92	Kurang
475	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Kabupaten	10,00	4,65	0,00	0,00	0,00	4,44	18,00	40,00	77,09	Baik
476	Kabupaten Talaud	Kabupaten	10,00	2,96	0,00	0,00	3,89	4,90	0,00	13,33	35,07	Kurang
477	Kabupaten Kepulauan Sangihe	Kabupaten	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	13,75	35,56	58,13	Cukup
478	Kabupaten Minahasa Selatan	Kabupaten	10,00	3,65	0,00	0,00	3,08	4,15	9,23	35,56	65,66	Cukup
479	Kabupaten Minahasa	Kabupaten	10,00	3,65	0,00	0,00	0,00	4,51	13,64	35,56	67,36	Cukup
480	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Kabupaten	9,39	5,00	0,00	0,00	0,00	3,56	9,00	35,56	62,52	Cukup

**PENILAIAN FINAL INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)**  
**KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda) TAHUN 2023**

No	Nama K/L/PD	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Purchasing	Toko Daring	Non e-Tendering/Non e-Purchasing	e-Kontrak	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ	Total Nilai Pembobotan	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
481	Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi	10,00	0,00	0,00	1,00	2,72	3,85	6,67	35,56	59,80	Cukup
482	Kota Palu	Kota	9,15	4,61	0,00	1,00	5,00	2,43	15,00	26,67	63,86	Cukup
483	Kabupaten Donggala	Kabupaten	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	4,44	12,26	Kurang
484	Kabupaten Parigi Moutong	Kabupaten	9,88	4,74	0,00	1,00	2,93	4,91	4,29	4,44	32,19	Kurang
485	Kabupaten Tojo Una-Una	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	5,00	4,46	12,00	40,00	77,46	Baik
486	Kabupaten Morowali	Kabupaten	10,00	4,44	0,00	0,00	3,10	3,41	2,40	31,11	54,46	Cukup
487	Kabupaten Banggai	Kabupaten	10,00	4,06	0,00	0,00	4,44	3,77	13,04	40,00	75,31	Baik
488	Kabupaten Poso	Kabupaten	5,27	4,99	0,00	1,00	3,86	4,94	6,00	26,67	52,73	Cukup
489	Kabupaten Buol	Kabupaten	10,00	4,93	0,00	1,00	2,60	2,87	22,50	4,44	48,34	Kurang
490	Kabupaten Toli-Toli	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	0,00	4,01	4,84	3,33	40,00	67,17	Cukup
491	Kabupaten Sigi	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	0,00	4,16	0,00	4,44	24,60	Kurang
492	Kabupaten Banggai Kepulauan	Kabupaten	10,00	4,57	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	8,89	25,90	Kurang
493	Kabupaten Morowali Utara	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	3,28	3,83	6,00	31,11	60,22	Cukup
494	Kabupaten Banggai Laut	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	0,00	2,56	3,56	0,00	8,89	30,01	Kurang
495	Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi	10,00	5,00	0,00	1,00	2,80	4,45	17,61	40,00	80,86	Baik
496	Kota Makassar	Kota	10,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,18	16,50	26,67	58,35	Cukup
497	Kota Palopo	Kota	10,00	4,79	0,00	0,00	5,00	3,61	3,16	4,44	31,00	Kurang
498	Kota Parepare	Kota	10,00	5,00	0,00	0,00	0,00	4,92	10,91	13,33	44,16	Kurang
499	Kabupaten Luwu Utara	Kabupaten	10,00	3,83	0,00	0,00	4,18	3,04	7,06	13,33	41,44	Kurang
500	Kabupaten Maros	Kabupaten	8,14	5,00	0,00	1,00	0,00	3,30	10,00	35,56	63,00	Cukup
501	Kabupaten Enrekang	Kabupaten	10,00	0,00	0,00	0,00	3,39	2,86	8,18	0,00	24,43	Kurang
502	Kabupaten Pinrang	Kabupaten	10,00	4,99	0,00	0,00	5,00	4,51	13,64	35,56	73,70	Baik
503	Kabupaten Sinjai	Kabupaten	7,14	5,00	0,00	0,00	5,00	4,27	12,86	26,67	60,94	Cukup
504	Kabupaten Bantaeng	Kabupaten	8,64	4,37	0,00	0,00	2,84	3,85	1,50	4,44	25,64	Kurang

PENILAIAN FINAL INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)  
KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda) TAHUN 2023

No	Nama K/L/PD	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Purchasing	Toko Daring	Non e-Tendering/Non e-Purchasing	e-Kontrak	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ	Total Nilai Pembobotan	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
505	Kabupaten Pangkajene & Kepulauan	Kabupaten	6,41	4,77	0,00	1,00	0,00	4,53	11,67	26,67	55,05	Cukup
506	Kabupaten Sidenreng Rappang	Kabupaten	9,30	4,96	0,00	1,00	0,00	4,80	4,29	26,67	51,02	Cukup
507	Kabupaten Luwu	Kabupaten	6,97	4,53	0,00	0,00	2,95	3,69	2,73	17,78	38,64	Kurang
508	Kabupaten Luwu Timur	Kabupaten	10,00	4,89	2,51	1,00	0,00	4,34	8,40	35,56	66,71	Cukup
509	Kabupaten Gowa	Kabupaten	10,00	4,76	0,00	1,00	3,08	4,20	8,57	35,56	67,17	Cukup
510	Kabupaten Bone	Kabupaten	10,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,87	5,56	35,56	55,99	Cukup
511	Kabupaten Bulukumba	Kabupaten	10,00	3,64	0,00	0,00	4,46	3,25	12,27	0,00	33,62	Kurang
512	Kabupaten Kepulauan Selasar	Kabupaten	10,00	4,09	0,00	1,00	3,50	4,50	0,00	4,44	27,53	Kurang
513	Kabupaten Takalar	Kabupaten	0,00	3,69	0,00	0,00	3,63	4,44	3,75	8,89	24,40	Kurang
514	Kabupaten Soppeng	Kabupaten	10,00	4,14	0,00	0,00	2,51	3,61	15,00	40,00	75,26	Baik
515	Kabupaten Wajo	Kabupaten	10,00	4,41	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	4,44	22,18	Kurang
516	Kabupaten Toraja Utara	Kabupaten	10,00	4,87	0,00	0,00	0,00	3,75	4,29	35,56	58,47	Cukup
517	Kabupaten Barru	Kabupaten	10,00	4,01	0,00	0,00	0,00	2,41	0,00	4,44	20,86	Kurang
518	Kabupaten Jenepono	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	0,00	5,00	3,66	10,59	8,89	43,14	Kurang
519	Kabupaten Tana Toraja	Kabupaten	6,98	4,97	0,00	1,00	0,00	1,40	0,00	0,00	14,34	Kurang
520	Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi	8,63	2,54	0,00	1,00	5,00	4,21	16,16	40,00	77,54	Baik
521	Kota Kendari	Kota	10,00	4,18	0,00	1,00	0,00	3,92	17,14	26,67	62,91	Cukup
522	Kota Bau-Bau	Kota	10,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,08	0,00	8,89	27,97	Kurang
523	Kabupaten Buton	Kabupaten	10,00	4,68	0,00	0,00	3,17	4,10	11,67	31,11	64,73	Cukup
524	Kabupaten Buton Utara	Kabupaten	10,00	4,84	0,00	0,00	3,44	4,96	18,00	4,44	45,67	Kurang
525	Kabupaten Konawe Selatan	Kabupaten	10,00	4,70	0,00	0,00	3,00	3,94	24,00	35,56	81,19	Baik
526	Kabupaten Konawe Utara	Kabupaten	10,00	3,74	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	4,44	21,15	Kurang
527	Kabupaten Wakatobi	Kabupaten	10,00	4,65	0,00	0,00	2,67	4,75	5,00	13,33	40,41	Kurang
528	Kabupaten Bombana	Kabupaten	10,00	4,00	0,00	0,00	4,37	3,20	11,11	35,56	68,23	Cukup

PENILAIAN FINAL INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)  
KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda) TAHUN 2023

No	Nama K/L/PD	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Purchasing	Toko Daring	Non e-Tendering/Non e-Purchasing	e-Kontrak	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBj	Tingkat Kematangan UKPBj	Total Nilai Pembobtan	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
529	Kabupaten Kolaka Utara	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	0,00	0,00	1,84	8,18	26,67	51,69	Cukup
530	Kabupaten Muna	Kabupaten	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00	4,44	11,89	Kurang
531	Kabupaten Kolaka	Kabupaten	7,53	5,00	0,00	0,00	4,84	4,84	13,64	4,44	40,29	Kurang
532	Kabupaten Konawe	Kabupaten	10,00	4,96	0,00	1,00	0,00	4,15	3,00	22,22	45,33	Kurang
533	Kabupaten Kolaka Timur	Kabupaten	6,72	3,60	0,00	0,00	3,97	2,99	15,00	8,89	41,17	Kurang
534	Kabupaten Konawe Kepulauan	Kabupaten	10,00	4,99	0,00	0,00	3,55	4,38	5,30	22,22	50,45	Cukup
535	Kabupaten Muna Barat	Kabupaten	10,00	4,71	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	8,89	24,85	Kurang
536	Kabupaten Buton Tengah	Kabupaten	7,14	4,64	0,00	1,00	0,00	4,13	12,00	35,56	64,46	Cukup
537	Kabupaten Buton Selatan	Kabupaten	10,00	4,65	0,00	0,00	4,26	3,29	2,73	22,22	47,14	Kurang
538	Provinsi Gorontalo	Provinsi	10,00	5,00	0,00	1,00	5,00	3,04	10,46	40,00	74,50	Baik
539	Kota Gorontalo	Kota	10,00	2,89	0,00	1,00	5,00	4,46	13,33	35,56	72,25	Baik
540	Kabupaten Bone Bolango	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	17,78	36,32	Kurang
541	Kabupaten Pohuwato	Kabupaten	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	5,77	35,56	55,07	Cukup
542	Kabupaten Boalemo	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	0,00	5,00	2,84	18,00	35,56	76,40	Baik
543	Kabupaten Gorontalo Utara	Kabupaten	10,00	4,36	0,00	0,00	0,00	3,56	12,86	4,44	35,21	Kurang
544	Kabupaten Gorontalo	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	1,00	5,00	4,07	7,24	35,56	67,87	Cukup
545	Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi	10,00	4,37	0,00	1,00	5,00	3,98	30,00	35,56	89,91	Baik
546	Kabupaten Mamuju	Kabupaten	10,00	4,97	0,00	0,00	3,93	3,50	6,00	8,89	37,29	Kurang
547	Kabupaten Polewali Mandar	Kabupaten	7,32	4,58	0,00	0,00	3,26	2,39	8,33	22,22	48,10	Kurang
548	Kabupaten Majene	Kabupaten	0,00	5,00	0,00	0,00	3,87	3,84	18,00	17,78	48,49	Kurang
549	Kabupaten Pasangkayu	Kabupaten	5,95	4,86	0,00	0,00	3,18	4,48	12,00	0,00	30,47	Kurang
550	Kabupaten Mamasa	Kabupaten	10,00	4,95	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	4,44	23,35	Kurang
551	Kabupaten Mamuju Tengah	Kabupaten	10,00	4,77	0,00	0,00	0,00	4,62	6,00	4,44	29,83	Kurang
552	Provinsi Maluku	Provinsi	7,51	4,75	0,00	1,00	5,00	4,80	8,94	40,00	72,00	Baik

PENILAIAN FINAL INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)  
KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda) TAHUN 2023

No	Nama K/L/PD	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Purchasing	Toko Daring	Non e-Tendering/Non e-Purchasing	e-Kontrak	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ	Total Nilai Pembobotan	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
553	Kota Ambon	Kota	6,34	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	4,44	15,77	Kurang
554	Kota Tual	Kota	5,67	4,67	0,00	0,00	4,35	1,64	5,00	4,44	25,78	Kurang
555	Kabupaten Buru	Kabupaten	5,53	4,78	0,00	0,00	3,81	3,68	0,00	0,00	17,80	Kurang
556	Kabupaten Maluku Tenggara	Kabupaten	8,19	2,52	0,00	0,00	0,00	4,06	2,50	8,89	26,16	Kurang
557	Kabupaten Seram Bagian Barat	Kabupaten	9,75	3,86	0,00	0,00	2,58	4,62	8,40	17,78	46,98	Kurang
558	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Kabupaten	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	4,06	0,00	0,00	8,35	Kurang
559	Kabupaten Seram Bagian Timur	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	0,00	4,24	2,49	0,00	4,44	26,17	Kurang
560	Kabupaten Maluku Tengah	Kabupaten	10,00	4,82	0,00	0,00	0,00	3,16	1,82	22,22	42,02	Kurang
561	Kabupaten Kepulauan Aru	Kabupaten	10,00	4,41	0,00	0,00	0,00	4,37	12,00	8,89	39,67	Kurang
562	Kabupaten Buru Selatan	Kabupaten	0,00	4,98	0,00	0,00	4,70	4,50	7,83	0,00	22,01	Kurang
563	Kabupaten Maluku Barat Daya	Kabupaten	9,46	4,29	0,00	0,00	0,00	3,16	0,00	4,44	21,34	Kurang
564	Provinsi Maluku Utara	Provinsi	6,80	4,89	0,00	1,00	3,14	4,11	13,33	31,11	64,38	Cukup
565	Kota Ternate	Kota	0,00	4,32	0,00	0,00	3,22	4,28	0,00	13,33	25,14	Kurang
566	Kota Tidore	Kota	10,00	4,77	0,00	0,00	5,00	4,71	6,92	0,00	31,40	Kurang
567	Kabupaten Halmahera Utara	Kabupaten	7,07	4,40	0,00	0,00	0,00	4,17	2,14	0,00	17,79	Kurang
568	Kabupaten Halmahera Tengah	Kabupaten	7,54	4,36	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	0,00	14,88	Kurang
569	Kabupaten Halmahera Selatan	Kabupaten	9,62	4,07	0,00	1,00	3,65	4,71	0,00	0,00	23,05	Kurang
570	Kabupaten Halmahera Barat	Kabupaten	10,00	4,51	0,00	0,00	0,00	4,39	3,00	0,00	21,90	Kurang
571	Kabupaten Halmahera Timur	Kabupaten	8,40	5,00	0,00	0,00	3,97	4,64	6,67	0,00	28,68	Kurang
572	Kabupaten Kepulauan Sula	Kabupaten	0,00	4,87	0,00	0,00	4,31	4,88	0,00	0,00	13,85	Kurang
573	Kabupaten Pulau Morotai	Kabupaten	5,39	5,00	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00	0,00	14,50	Kurang
574	Kabupaten Taliabu	Kabupaten	7,28	4,37	0,00	0,00	4,54	4,61	11,05	0,00	31,85	Kurang
575	Provinsi Papua	Provinsi	10,00	5,00	0,00	0,00	2,60	2,34	18,81	40,00	78,75	Baik
576	Kota Jayapura	Kota	7,29	4,23	0,00	0,00	0,00	4,11	4,29	31,11	51,03	Cukup

PENILAIAN FINAL INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)  
KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda) TAHUN 2023

PENILAIAN FINAL INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN (ITKP)  
KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH (K/L/Pemda) TAHUN 2023

No	Nama K/L/PD	Bentuk Instansi	SIRUP	e-Tendering	e-Purchasing	Toko Daring	Non e-Tendering/Non e-Purchasing	e-Kontrak	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Tingkat Kematangan UKPBJ	Total Nilai Pembobotan	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
601	Kabupaten Yalimo	Kabupaten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kurang
602	Kabupaten Deiyai	Kabupaten	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	9,59	Kurang
603	Kabupaten Intan Jaya	Kabupaten	10,00	4,94	0,00	0,00	3,89	4,93	0,00	4,44	28,20	Kurang
604	Kabupaten Nduga	Kabupaten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kurang
605	Provinsi Papua Barat	Provinsi	0,00	4,81	0,00	0,00	2,67	3,83	0,00	4,44	15,74	Kurang
606	Kota Sorong	Kota	0,00	4,86	0,00	0,00	5,00	3,86	0,00	0,00	13,72	Kurang
607	Kabupaten Manokwari	Kabupaten	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	3,51	0,00	22,22	30,16	Kurang
608	Kabupaten Fak-Fak	Kabupaten	0,00	4,97	0,00	0,00	3,66	4,21	2,61	13,33	28,78	Kurang
609	Kabupaten Kaimana	Kabupaten	0,00	4,24	0,00	0,00	3,95	4,31	0,00	0,00	12,50	Kurang
610	Kabupaten Raja Ampat	Kabupaten	8,70	4,93	0,00	0,00	4,66	4,79	0,00	31,11	54,19	Cukup
611	Kabupaten Sorong	Kabupaten	0,00	5,00	0,00	0,00	4,15	3,50	0,00	0,00	12,65	Kurang
612	Kabupaten Sorong Selatan	Kabupaten	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	Kurang
613	Kabupaten Teluk Bintuni	Kabupaten	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	9,40	Kurang
614	Kabupaten Tambrauw	Kabupaten	0,00	4,99	0,00	0,00	2,53	4,24	0,00	0,00	11,76	Kurang
615	Kabupaten Maybrat	Kabupaten	0,00	5,00	0,00	0,00	3,93	3,44	0,00	0,00	12,37	Kurang
616	Kabupaten Teluk Wondamah	Kabupaten	7,38	4,18	0,00	0,00	5,00	4,96	0,00	0,00	21,52	Kurang
617	Kabupaten Manokwari Selatan	Kabupaten	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	4,64	0,00	0,00	9,64	Kurang
618	Kabupaten Pegunungan Arfak	Kabupaten	8,83	3,64	0,00	0,00	3,46	4,49	0,00	0,00	20,42	Kurang
619	Provinsi Kalimantan Utara	Provinsi	6,70	4,94	0,00	1,00	0,00	3,70	8,75	40,00	65,09	Cukup
620	Kota Tarakan	Kota	10,00	5,00	0,00	0,00	0,00	3,13	18,00	35,56	71,69	Baik
621	Kabupaten Bulungan	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	0,00	2,81	4,33	10,50	26,67	59,30	Cukup
622	Kabupaten Nunukan	Kabupaten	10,00	5,00	0,00	0,00	3,39	4,95	9,00	35,56	67,90	Cukup
623	Kabupaten Malinau	Kabupaten	10,00	4,71	0,00	0,00	0,00	4,82	5,63	8,89	34,05	Kurang
624	Kabupaten Tana Tidung	Kabupaten	8,33	4,20	0,00	0,00	0,00	2,54	6,00	17,78	38,85	Kurang